



ORASI PENGUKUHAN PROFESOR RISET SETJEN DPR RI
BIDANG MASALAH-MASALAH HUBUNGAN INTERNASIONAL



OLEH:

POLTAK PARTOGI NAINGGOLAN

**PARLEMEN DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL:
DIPLOMASI DPR-RI DI FORA INTERNASIONAL**

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Jakarta 2013

ISBN: 978-979-9052-82-7



**ORASI PENGUKUHAN PROFESOR RISET
BIDANG MASALAH-MASALAH
HUBUNGAN INTERNASIONAL**



**PARLEMEN DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL:
DIPLOMASI DPR-RI DI FORA INTERNASIONAL**

OLEH:

POLTAK PARTOGI NAINGGOLAN

**SEKRETARIAT JENDERAL DPR-RI
JAKARTA, 18 SEPTEMBER 2013**

**© Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)
Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
2013**

ISBN: 978-979-9052-82-7

Katalog Dalam Tulisan (KDT)

**Parlemen dan Hubungan Internasional:
Diplomasi DPR-RI di Fora Internasional**

vi + 84 hlm; 14.5 X 21 cm

**1. Parlemen; 2. Hubungan Internasional; 3. Diplomasi;
4. DPR-RI; 5. Fora Internasional**



**Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)
Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia
Gedung Nusantara I Lt. 2
Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270
Telpon: (021) 5715409
Faks: (021) 5715245
Website: www.dpr.go.id**

RIWAYAT HIDUP



Poltak Partogi Nainggolan, menikah dengan Riris Katharina Panjaitan dan memiliki seorang putri, Reynnalda Alisha Nainggolan. Dilahirkan di Jakarta pada 26 Juni 1963 dari pasangan bapak Sahat M. Nainggolan S.H. dan ibu Dorcas Napitupulu. Menyelesaikan pendidikan dasar di SDN Jend. Sudirman Jakarta pada tahun 1974, sekolah menengah pertama di 58 Jakarta pada tahun 1977, dan sekolah menengah atas Negeri 3 Jakarta pada tahun 1981.

Menyelesaikan studi Sarjana di Jurusan Ilmu Politik dan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia (FIS-UI) pada tahun 1986. Menyelesaikan studi Master (S-2) Departemen Ilmu Politik dan Hubungan Internasional *the University of Birmingham*, Inggris, pada tahun 1999, menyelesaikan studi Doktor pada *Seminar fuer Wissenschaftliche Politik* di *Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg*, am Breisgau, Baden Wuerttemberg, Jerman, pada tahun 2011.

Mengikuti kursus-kursus bahasa asing, lokakarya, serta kegiatan riset dan seminar internasional di Eropa, terutama Inggris dan Jerman, dan AS, serta negara lainnya. Magang di parlemen negara bagian Jerman (*Thueringer Landtag*), Thueringen, dengan beasiswa *Konrad Adenauer Stiftung* pada tahun 1993. Memperoleh *Hanns Seidel Stiftung Fellowship for international visiting fellow* di *Arnold-Bergstrasser Institut*, Freiburg, Baden Wuerttemberg, Jerman, 2004, dan *US State Department Fellowship for International Leaders Program* tahun 2005.

Jabatan fungsional peneliti diawali sebagai Ajun Peneliti Madya tahun 1995, Peneliti Madya tahun 1997, Ahli Peneliti Muda tahun 2001, Peneliti Utama gol.IV/D tahun 2002 dan sebagai Peneliti Utama IV/E bidang Masalah-masalah Hubungan Internasional

tahun 2006, dengan pangkat golongan IV/E dicapai tahun 2011 di Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR-RI. Jabatan struktural yang diembannya adalah Kepala Bidang Pengkajian P3DI Sekretariat Jenderal DPR-RI sejak tahun 2009. Sejak tahun 1984 mempublikasikan berbagai artikel, hasil-hasil riset dan kajian di berbagai surat kabar, majalah, jurnal, dan buku dalam bahasa Indonesia (75) dan Inggris (22). Publikasi ilmiahnya tersebar dalam 28 buku, 47 jurnal, dan 22 majalah, dan 198 tulisan untuk surat kabar, sebagai penulis tunggal di 60 publikasi dan 34 di publikasi bersama buku dan jurnal/majalah ilmiah.

Aktif di berbagai organisasi proresi yaitu sebagai anggota dari *British Chevening Schoolar*, Asosiasi Peneliti Parlemen Asia, Perhimpunan Akademisi/Peneliti Asia Tenggara *Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg* dan Asosiasi Peneliti Asia Tenggara *Arnold-Bergstrasse Institut (ABI) Freiburg*, Jerman.

Sebagai pengajar tentang masalah-masalah keparlemenan, *legal drafting*, *legislative*, *researches*, dan analisis di berbagai institusi, LSM, dan Universitas, didalam dan luar negeri: membimbing riset mahasiswa program doktoral *Universitaet Hamburg*, *Universitaet Heidelberg*, dan *Universitaet Freiburg*, dan melakukan riset terkini tentang masalah-masalah internasional terkait *security sector reform*, *non-traditional security threats*, politik dan demokrasi, keamanan kawasan, dan ASEAN. Aktif memberikan dukungan keahlian, pendampingan, dan menyediakan analisis kebijakan mengenai masalah-masalah hubungan internasional untuk DPR-RI, terutama untuk Komisi Luar Negeri (Komisi 1) dan Kerja-Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR-RI sejak tahun 1990, baik dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, maupun pengawasan. Menghadiri kegiatan seminar, lokakarya, konferensi yang dilakukan berbagai instansi, LSM, pusat riset, kalangan akademis, universitas, khususnya yang dilakukan bidang studi Asia Tenggara *National Assembly Research Service (NARS)* Korea, dan *International Parliamentary Forum (IPF)-Security Sector Governance (SSG)* bersama *Friedrich Ebert-Stiftung* dan *Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF)*.

PRAKATA PENGUKUHAN

Selamat pagi, salam damai untuk kita semua,

Yang terhormat, Majelis Pengukuhan Profesor Riset,

Yang terhormat, Bapak Ketua dan Anggota DPR-RI,

Yang terhormat, Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR-RI dan LIPI,

Yang tercinta, teman-teman peneliti,

Para undangan dan hadirin yang saya muliakan,

Parlemen sebagai salah satu dari sekian banyak aktor hubungan internasional belum banyak diperhatikan. Demikian pula, disiplin hubungan internasional yang begitu luas, mencakup diplomasi sebagai salah satu bidang kajiannya, masih jarang mengulas peran parlemen sebagai salah satu aktor dari beberapa jalur atau praktek diplomasi yang telah dikenal dewasa ini. Sesuai dengan bidang kepakaran saya mengenai masalah-masalah hubungan internasional, dan juga penelitian yang banyak saya lakukan mengenai dan di parlemen, saya menyampaikan orasi ilmiah dengan judul, "Parlemen dan Hubungan Internasional: Diplomasi DPR-RI di Fora Internasional."

DAFTAR ISI

RIWAYAT HIDUP	iii
PRAKATA PENGUKUHAN	v
DAFTAR ISI	vi
I. PENDAHULUAN.....	1
II. PANGGUNG BILATERAL	5
III. PANGGUNG MULTILATERAL	9
IV. MASALAH TIMOR-TIMUR (TIMTIM).....	13
V. MEMPERJUANGKAN KEBEBASAN	15
VI. MEMBELA KEHORMATAN BANGSA.....	20
VII. EVALUASI PERAN	22
VIII.KESIMPULAN	27
IX. PENUTUP	29

I. PENDAHULUAN

Majelis Pengukuhan Profesor Riset, hadirin sekalian,

Pembicaraan mengenai parlemen selama ini lebih banyak difokuskan pada peran dan kinerjanya dalam lingkup nasional. Belum banyak orang yang memperoleh informasi mengenai peran parlemen di fora internasional, apalagi memandang penting kehadiran dan kinerjanya dalam hubungan internasional, khususnya diplomasi. Ini artinya, parlemen, apakah itu anggota Majelis Rendah atau Majelis Tinggi, DPR atau Senat, dan yang unikameral atau bikameral, yang terpilih melalui proses pemilu yang demokratis, lebih sekedar menjalankan praktek diplomasi, namun menjalankan politik di fora internasional pada umumnya.¹

Hubungan internasional itu sendiri memiliki aspek yang luas, seluas arena diplomasi yang harus dimainkan para aktornya. Di sini lah para anggota parlemen dapat memperlihatkan kinerjanya, sebagai bagian dari para pelaku diplomasi, yang terbagi atas aktor negara dan non-negara, berkelompok dan individual, terkordinasi dan lepas, serta menjalankan jalur satu diplomasi (*first track diplomacy*) atau jalur dua diplomasi (*second track diplomacy*).² Begitu pula, mereka dapat memainkan perannya secara formal dan tidak formal, untuk kepentingan individual, nasional, kawasan, dan internasional.¹

Selanjutnya, mengapa harus (anggota) parlemen yang terpilih secara demokratis yang dapat efektif memainkan peran internasionalnya? Alasannya, karena ini menyangkut dukungan legitimasi politik publik (konstituen) pendukungnya dan pengakuan negara lain yang menerima atau sebagai mitra kerjanya. Sebab, diplomasi juga tidak bisa dipraktekkan dalam sistem atau secara otoriter.²

Diketahui, terminologi “diplomasi parlemen” bukannya baru muncul dewasa ini. Terminologi sudah diperkenalkan sejak 1889, sejak IPU (*Inter-Parliamentary Union*) didirikan dan perannya terus meningkat dalam hubungan internasional dewasa ini. Terminologi ini sering dikampanyekan Prancis, salah satu negara pendiri IPU. Di Indonesia, pada masa Orba, dengan DPR-RI yang sangat aktif dan berperan besar di IPU, pernah digunakan istilah “diplomasi parlementer” --mengikuti kaidah pemakaian istilah “demokrasi parlementer”-- yang sepadan dengan penggunaan terminologi “*parliamentary democracy*” dalam Bahasa Inggris dan “*diplomatie parlementaire*” dalam Bahasa Prancis, walaupun pemakaian istilah itu belum tentu tepat menurut kaidah Bahasa Indonesia.³

Berdiplomasi adalah upaya membangun citra diri dalam fora yang lebih luas, selain mencoba mengetahui dan mempengaruhi kondisi dan pandangan, serta mempengaruhi orang lain, yang dilakukan melalui kegiatan ke luar negeri. Karena ada faktor melakukan kunjungan ke negeri orang yang belum pernah dikunjungi, dan ingin mengetahui sesuatu yang baru, wajar saja, argumen pentingnya menjalankan diplomasi internasional, yang sering dijadikan alasan untuk melakukan kunjungan kerja ke mancanegara, digandrungi banyak anggota DPR-RI. Terlebih lagi, dibiayai dan difasilitasi oleh negara, yang artinya akan ada sisa uang saku, yang dapat dikumpulkan untuk disumbangkan ke kas partai.⁴ Hanya keterbatasan anggaran negara dan kecakapan individu anggota DPR-RI akan menseleksi siapa-siapa yang dapat ikut melakukannya.⁵

Perkembangan hubungan internasional pasca-Perang Dingin telah memperlihatkan semakin beragamnya para pelaku diplomasi. Parlemen dan anggotanya dalam hal ini merupakan bagian dari pelaku diplomasi jalur dua, untuk membedakannya dari para diplomat kementerian luar negeri (Kemlu) dan kalangan pemerintah lainnya, sebagai aktor yang memainkan peran di jalur satu.⁶ Sekalipun berada di jalur dua, itu tidak

berarti peran mereka kalah penting dibandingkan dengan pemerintah, atau sebaliknya, lebih penting daripada lembaga non-pemerintah, kalangan bisnis, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yang berada di jalur tiga dan empat dalam *multitrack diplomacy*. Di sini, peran parlemen dan anggotanya dapat dikategorikan sebagai organisasi negara lainnya dan individu-individu, atau aktor internasional lain.¹ Namun, dalam buku teks studi hubungan internasional lebih awal, peran parlemen dan anggota-anggotanya belum disebut. Peran mereka sebagai pembawa pesan (*messengers*) negara yang penting, belum dikenal, sebab, berbeda dengan *primitive diplomats*.⁶ Padahal, dalam perkembangan hubungan internasional, khususnya sejarah diplomasi, yang tidak lagi konvensional, mereka turut memainkan peran penting dalam kegiatan yang disebut sebagai lobi, perundingan atau negosiasi.⁷

Jika melihat kembali sejarah diplomasi, apa yang dilakukan anggota DPR-RI ke luar negeri, tidak hanya membawa paspor dinas/diplomat, namun juga membawa pesan penting untuk disampaikan dan diperjuangkan di negara tujuan, maka tidak dapat disangkal, mereka turut berperan dalam melakukan diplomasi damai yang bersifat terbuka,⁸ sebagaimana yang dilakukan para diplomat dari instansi pemerintah, seperti Kemlu. Di sini, misi kepentingan nasional yang mereka bawa harus diperjuangkan secara maksimal,⁸ seperti lajimnya yang dilakukan para diplomat karir Kemlu.

Diplomasi internasional secara mendasar membutuhkan pengaturan-pengaturan atau aturan main yang dapat diterima secara luas. Dalam kegiatan diplomasi internasional diketahui ada kegiatan melakukan observasi, pelaporan dan evaluasi hasil. Yang terpenting dan relevan dengan kehadiran parlemen, tentu saja, terdapatnya fungsi representasi dan proteksi kepentingan negara.⁹ Dengan demikian, parlemen dan anggota-anggotanya secara individual dapat membantu aktor utama di jalur satu, yakni pemerintah, dalam menjalankan secara komprehensif

komunikasi diplomatik⁹ dan juga fungsi mediasinya.¹⁰ Dalam kegiatan diplomasi menyeluruh, para anggota parlemen bisa berperan dalam memberikan saran dan nasehat untuk suatu kebijakan, dan bahkan, dalam *pre-negotiation*, sebelum diplomat pemerintah di jalur satu berangkat menjalankan misinya di mancanegara. Mereka bisa terlibat misi diplomasi negara bersama diplomat pemerintah, sebagai bagian dari kegiatan diplomasi negara yang terencana dengan baik.¹⁰ Dalam perkembangan diplomasi modern, keterlibatan anggota parlemen menjadi tidak terhindarkan untuk menjalankan apa yang disebut kegiatan diplomasi yang demokratis (*democratic diplomacy*).¹¹

II. PANGGUNG BILATERAL

Majelis Pengukuhan Profesor Riset, hadirin sekalian,

Dalam dua dasawarsa terakhir, diplomasi parlemen mulai gencar dilakukan melalui forum Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB). Dari tahun ke tahun, terjadi penambahan negara yang parlemennya dapat diajak bekerja sama melalui jalur bilateral ini, termasuk dengan negara yang parlemennya belum dihasilkan dari proses pemilu yang terbuka dan jujur. Sikap pemerintah yang mendukung, terutama dalam penambahan alokasi anggaran perjalanan luar negeri DPR-RI, telah memudahkan terbentuknya banyak GKSB, yang bisa mencapai lebih 20 grup dalam setiap pembentukannya, di setiap awal periode parlemen. Kebutuhan mendesak di lapangan, atau mulai munculnya kesadaran Kemlu akan keterbatasan perannya dalam menjalankan diplomasi formal antar-negara, terutama untuk merespons isu-isu sensitif, seperti separatisme, terutama Timor-Timur (Timtim),³ telah membuka peluang datangnya dukungan pemerintah atas jumlah anggaran yang tidak sedikit untuk itu. Tidak heran, banyak kerja sama bilateral antar-parlemen yang baru, dibuka, termasuk dengan negara-negara yang masih belum stabil kondisi domestiknya dan belum diperhitungkan di panggung internasional, seperti Bosnia Herzegovina, Laos, dan Ekuador.

Krisis ekonomi kawasan yang berdampak pada kemampuan anggaran nasional untuk mendukung aktifitas diplomasi bilateral, hanya sedikit mengganggu kinerja internasional DPR-RI.¹² Kegiatan diplomasi bilateral parlemen tidak terhenti sama sekali, hanya frekuensinya berkurang akibat kebijakan efisiensi, sebagai dampak depresiasi Rupiah atas dolar AS, yang dijadikan patokan penganggaran untuk melakukan perjalanan luar negeri.¹³ Efisiensi hanya berdampak pada pengurangan jumlah delegasi, namun animo untuk melakukan kunjungan luar negeri tidak surut.¹²

Terdapat berbagai bentuk diplomasi bilateral parlemen, tidak terbatas pada kegiatan saling kunjung. Ini artinya, diplomasi bilateral juga dilakukan di sela-sela berlangsungnya forum multilateral, seperti kegiatan mencari dukungan politik yang dilakukan anggota DPR-RI dengan masing-masing grup nasional parlemen Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina, dalam menghadapi masalah Timtim, dalam Sidang Umum AIPO (*ASEAN Inter-Parliamentary Organization*), yang di kemudian hari menjadi AIPA (*ASEAN Inter-Parliamentary Assembly*), dan sidang berbagai organ subordinasinya. Hal ini juga dilakukan dalam forum multilateral, bahkan yang lebih luas, yakni Sidang Umum IPU dan aktifitas sub-sub organisasinya.¹⁴ Dalam kasus yang sama, Delegasi IPU DPR-RI melakukan pertemuan tertutup dan lobi lebih dulu dengan anggota Parlemen Eropa, yang masih memiliki ikatan emosional dan simpati dengan Indonesia, terutama mereka yang pernah bertugas di Indonesia. Sehingga, dunia internasional lebih dapat memahami dilema yang dihadapi pemerintah saat itu, dan sikap anti-Indonesia di forum IPU tidak meluas dan semakin menyudutkan kepentingan nasional.³

Berbeda dengan kegiatan diplomasi di forum multilateral, aktifitas diplomasi parlemen bilateral lebih banyak dilakukan ketika parlemen dalam masa reses. Diplomasi bilateral jenis ini tentu harus lebih jelas tujuan dan serius persiapannya, karena publik dan media massa sangat menyorot keberangkatan anggota DPRRI yang meninggalkan sidang. Tetapi, diplomasi parlemen bilateral yang menggunakan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) tetap saja rawan disorot publik, sekalipun dilakukan pada masa reses.¹⁴ Sebab, buat publik, masa reses adalah masa bagi anggota parlemen yang telah terpilih secara demokratis di negara manapun untuk mengunjungi konstituen mereka.¹⁵

Untuk membantu Delegasi DPR-RI agar dapat maksimal mencapai keinginannya, seringkali pihak Kemlu mengirim pendamping yang memiliki keahlian terkait, selain pendamping

dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI). Kehadiran diplomat Kemlu bisa atas permintaan DPR-RI atau keputusan Kemlu agar mereka bisa menyamakan langkah dan sikap. Di sini aktifitas dan peilaku jalur satu dan dua diplomasi internasional bertemu, bisa bersinergi, ataupun memperlihatkan kontradiksi.¹⁶

Memang terdapat antusiasme para anggota dewan untuk membicarakan masalah luar negeri, walaupun belum tentu mereka dapat memahami, apalagi menguasainya dengan baik. Tidak heran, kunjungan luar negeri dalam rangka diplomasi bilateral didukung luas anggota DPR-RI. Dapat dikatakan, hanya sedikit anggota DPR-RI yang menentanginya untuk alasan efisiensi dan ada pilihan kebijakan yang lebih mendesak.¹⁷ Juga, hampir tidak ada yang menolaknya karena sikap anti-asing atau nasionalisme berlebihan.

Kegiatan diplomasi internasional buat anggota DPR-RI bisa dikatakan *lucrative*, mengingat besarnya anggaran yang disiapkan untuk mendukung kegiatan mereka secara kelompok ataupun individual, sehingga mereka dapat menikmati fasilitas transportasi dan akomodasi yang sangat nyaman, dengan *per diem* yang memadai.¹⁸ Menjadi *lucrative*, karena berbeda dengan di negara maju yang pengawasan keuangannya sangat ketat dan akuntabilitasnya sangat tinggi, kegiatan diplomasi internasional DPR-RI didukung anggaran dengan sistem *lumpsum*, dan tidak *at cost*.¹⁹ Sehingga, selain dapat menambah pengetahuan baru, keterlibatan anggota DPR-RI dalam diplomasi internasional juga dapat digunakan untuk meningkatkan *income* pribadi dan mendukung kas partai, apalagi jika semakin sering dilakukan.²⁰

Tingginya animo anggota DPR-RI untuk terlibat dalam diplomasi internasional telah mendorong terbentuknya GKSB baru DPR-RI dengan parlemen dari negara yang kondisinya tidak stabil, karena ancaman keamanan yang datang dari kejahatan transnasional narkoba, yakni Ekuador. Negeri ini sangat jauh letaknya dari Indonesia, namun dipilih sebagai mitra kerja bilateral. Alasan pemilihan DPR-RI dan urgensinya

untuk dijadikan sasaran diplomasi internasional memang menimbulkan pertanyaan. Sedangkan pengalaman Ekuador dalam memerangi jaringan narkoba internasional belum dapat dijadikan argumen yang kuat untuk mengunjungi negeri itu, mengingat kian besarnya dukungan anggaran yang dibutuhkan, karena jauhnya jarak Ekuador dari Indonesia.

Jadi, GKSBB dan diplomasi parlemen tidak hanya sudah terbentuk dan dapat dilancarkan dengan Kuba, negeri komunis yang berseberangan ideologinya dengan Indonesia, dan Venezuela, yang presidennya menjadi penentang hegemoni kapitalisme AS di dunia, khususnya Amerika Latin. Namun, publik tetap mempertanyakan, apakah pilihan DPR-RI meningkatkan diplomasi internasional dengan Venezuela tidak karena kelebihan negara itu dalam seringkali memenangkan kontes ratu kecantikan dunia,²¹ tetapi didorong upaya membangun keseimbangan strategis (*strategic balance*) dan keseimbangan dinamis (*dynamic balance*) di dunia dewasa ini? Sehingga, alasan kuat DPR-RI harus dapat diperlihatkan di fora internasional, apalagi di lingkup bilateral, jika memang benar menjadi pilihan strategis untuk mengakhiri eskalasi ketegangan akibat aksi saling unjuk kekuatan dan gertak, yang merupakan warisan budaya Perang Dingin di berbagai mandala, seperti Amerika Latin, Timur-Tengah, dan Laut Cina Selatan. Karenanya, untuk menghindari sinisme publik, pilihan membuka GKSBB baru, tentu harus menghindari kepentingan pragmatisme individual anggota DPR-RI untuk sekedar melihat keindahan negeri dan penduduk di negeri tujuan, atau dapat menikmati plesiran.²²

III. PANGGUNG MULTILATERAL

Majelis Pengukuhan Profesor Riset, hadirin sekalian,

Diplomasi internasional parlemen yang lebih luas dapat dilakukan DPR-RI melalui jalur multilateral, yakni berbagai forum organisasi parlemen di kawasan dan dunia, seperti AIPO/AIPA untuk kawasan Asia Tenggara, PUIC (*Parliaments of Union of Islamic Countries*) bersama negara anggota OKI, APPF (*Asia Pacific Parliamentary Forum*) bersama negara Asia Pasifik, APA (*Asia Parliamentary Assembly*) bersama negara Asia, dan IPU, sebagai forum global. Di jalur multilateral, seperti halnya dalam pendirian ASEAN, DPR-RI merupakan salah satu perintis pembentukan AIPO dan terlibat aktif sejak awal pendiriannya pada awal dasawarsa 1970.²³ Begitu pula dalam PUIC, APPF, dan APA, sekalipun DPR-RI bukan salah satu negara pendiri, DPR-RI selalu aktif dalam kegiatan yang diagendakan mereka. Hal serupa terlihat dalam partisipasi DPR-RI di berbagai forum IPU, hampir tidak ada kegiatan yang tidak melibatkan anggota DPR-RI. Dalam berbagai forum kawasan dan dunia itu, DPR-RI bahkan telah berkali-kali sebagai tuan rumah penyelenggara Sidang Umum, tidak hanya untuk kegiatan sub-organisasi atau agenda yang lebih kecil dan tema-tema khusus, seperti Komisi Studi dan lain-lain.²⁴

Dalam AIPO/AIPA, DPR-RI telah berperan berkali-kali sebagai tuan rumah Sidang Umum dan sidang-sidang yang terkait dengannya. Jakarta, Yogyakarta, Bali, dan Lombok telah menjadi saksi sejarah pelaksanaan berbagai forum besar dan kecil AIPO.²⁵ Pembentukan AIPO sendiri sejak awal difasilitasi Indonesia. Sementara, AIPA, sebagai metamorfosis AIPO menuju sebuah "*ASEAN Parliament*", AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya) dan Tata-Tertib-nya disiapkan dan disepakati di Indonesia.²⁶ PUIC, yang melibatkan negara

Islam di lintas-kawasan, telah diselenggarakan Sidang Umumnya pada akhir tahun 2011 di Palembang. Ini belum terhitung sidang Komisi Pengarah PUIC yang pernah diselenggarakan pada tahun 2000 di Jakarta. Kemudian, untuk APPF, Indonesia pernah menjadi tuan rumah kegiatannya di Jakarta pada tahun 2006. Demikian pula, dalam fora diplomasi internasional yang lebih luas keanggotaannya, seperti APA dan IPU, DPR-RI tercatat masing-masing dua kali sebagai tuan rumah penyelenggara Sidang Umum masing-masing organisasi parlemen internasional itu.²⁷ Kota-kota besar di luar Jakarta telah terangkat namanya di fora internasional, karena pernah sebagian sebagai tuan rumah Sidang Umum dan sidang-sidang kecil dan spesifik lainnya terkait agenda APA dan IPU.

Posisi delegasi Indonesia yang cukup penting di berbagai sidang AIPO/AIPA adalah sebagai anggota dan bahkan pimpinan tim perumus pembuatan resolusi, AD/ART dan Tata Tertib, serta Komisi Studi. Selain Ketua DPR-RI pernah dua kali menduduki posisi sebagai Presiden *IPU Conference*, dalam periode Orde Baru (Orba), beberapa anggota DPR-RI yang memiliki kapasitas tinggi dalam diplomasi internasional, dengan kemampuan lobi-lobi mereka, dapat mempengaruhi berbagai forum Sidang Umum IPU, sehingga bisa menduduki posisi strategis, misalnya Marzuki Darusman, sebagai Wakil Ketua Komisi Keparlemenan, Hukum dan HAM, pada tahun 1990-1992. Selanjutnya, Tati Darsoyo sebagai Ketua Komisi Kordinasi Anggota Parlemen Perempuan pada tahun 1994-1996, dan Theo Sambuaga sebagai Ketua Komisi Politik, Keamanan Internasional, dan Perlucutan Senjata pada tahun 1997.³ Di masa pasca-Orba, pada tahun 2007, Simon Patrice Morin terpilih sebagai Wakil Presiden Komisi IPU untuk Perdamaian dan Keamanan Internasional.²⁷ Setahun sesudahnya, yaitu tahun 2008, Abdillah Toha terpilih sebagai Wakil Presiden Komisi Eksekutif IPU mewakili Grup Asia-Pasifik.

Indonesia memang pernah dua kali sebagai tuan rumah penyelenggaraan IPU, namun itu bukan semata karena perjuangan

diplomasi internasional delegasi DPR-RI, tetapi juga karena kesempatan besar yang tersedia akibat banyak negara yang tidak antusias menjadi tuan rumah ketika dunia belum pulih sama sekali dari dampak krisis ekonomi yang menimpa Asia tahun 1997. Selain itu, dengan mendukung sebagai tuan rumah, dunia ingin mengangkat Indonesia sebagai model negara yang sedang melakukan konsolidasi demokratis. Banyak negara saat itu tidak mau repot dan siap menjadi penyelenggara dengan menyiapkan pelayanan yang maksimal. Itulah sebabnya, dalam suasana euphoria reformasi, pada tahun 2000, Jakarta menjadi penyelenggara Sidang Umum ke-104 dan sidang-sidang IPU terkait. Hebatnya lagi, dalam tempo 7 tahun, yakni pada tahun 2007, Delegasi DPR-RI menawarkan Bali sebagai pengganti Bangkok, Thailand, sebagai tuan rumah Sidang Umum ke-116 dan sidang-sidang terkait IPU lainnya yang diselenggarakan simultan. Persiapan dilakukan dalam waktu sangat singkat, tidak lebih dari 4 bulan. Dukungan penganggaran dalam APBN-P (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan) mudah dikucurkan, disetujui pemerintah tanpa pertimbangan mendalam, karena kewenangan konstitusional DPR-RI pasca-1998 yang besar dalam menentukan anggarannya sendiri, sebagai bagian kewenangan legislasi yang meningkat signifikan, namun dengan segala keterbatasan yang ada dalam penyelenggaraan sidang.²⁹

Fora diplomasi multilateral yang dilakukan DPR-RI tidak hanya di IPU, tetapi juga di PBB dan organ-organ subordinasinya. Secara rutin, hampir setahun sekali, Ketua DPR-RI mengikuti pertemuan para ketua parlemen sejagad dengan Sekjen PBB di Markas PBB New York, yang dikordinasikan IPU. Juga, ada konperensi spesifik PBB dan IPU untuk membahas masalah khusus, seperti turisme, dan perdagangan bebas, yang berkordinasi dengan organ PBB terkait seperti *World Tourism Organization* dan *World Trade Organization*.³⁰

Fora multilateral dapat dipilih, antara yang fokus pada kepentingan kawasan atau global, dan yang bersifat isu atau

individual. Untuk kawasan (regional), DPR-RI terlibat dalam kegiatan AIPO/AIPA, APPF, APA, ASEP (*Asia-Europe Parliamentary Partnership*), APPCED (*Asia-Pacific Parliamentarians Conference on Environment and Development*), FASPPED (*Forum of Asia Pacific Parliamentarians for Education*), FEALAC'S YPF (*Forum for East Asia-Latin America Cooperation's Young Parliamentarians Forum*), AFPPD (*Asia Forum Parliamentarians on Population and development*), dan AEYPM (*Asia-Europe Young Parliamentarians Meeting*). Untuk yang bersifat global, DPRRI secara rutin bisa lebih dari sekali dalam setahun terlibat dalam fora internasional IPU dan PUIC. Selanjutnya, untuk yang bersifat lebih memperlihatkan kinerja anggota parlemen secara individual untuk isu-isu tertentu, DPR-RI terlibat dalam sidang-sidang PGA (*Parliamentarians Global Action*), GOPAC (*Global Parliamentarians Action Against Corruption*), IPAIT (*International Parliamentarians Association for Information Technology*), dan IPSS (*Inter-Parliamentarians for Social Service*).²⁸ Di luar berbagai forum ini, peluang untuk menjalankan diplomasi parlemen dapat dilakukan DPR-RI bersama-sama pemerintah, sebagai anggota Delegasi RI (Delri) di fora PBB dan non-PBB, seperti memenuhi undangan IMF (*International Monetary Fund*) dan Bank Dunia (*World Bank*).

IV. MASALAH TIMOR-TIMUR (TIMTIM)

Majelis Pengukuhan Profesor Riset, hadirin sekalian,

Selain memperoleh kesempatan untuk menjadi tuan rumah dan menduduki posisi penting, diplomasi parlemen yang dilakukan DPR-RI juga membuahkan hasil yang mendukung kebijakan pemerintah dan posisi RI di forum internasional. Sejak tahun 1987, kehadiran Delegasi DPR-RI di berbagai forum IPU, misalnya, dapat mencegah berbagai usaha negara-negara anggota IPU yang memojokkan Indonesia dalam masalah Timor-Timur (Timtim).³ Delegasi DPR-RI berhasil menggagalkan masuknya klausul yang menekan Indonesia dalam berbagai resolusi, terutama mengenai politik dan hak asasi manusia. Klausul semacam itu dimotori oleh Portugal yang didukung para sekutunya di Eropa, Amerika Latin, dan Asia, baik yang memiliki hubungan geografis (satu grup geopolitik di IPU), historis, dan kultural, maupun yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM).

Isu Timtim mencuat dalam berbagai forum IPU sejak tahun 1983, setelah munculnya kecaman-kecaman Komisi HAM PBB pada 16 Pebruari 1983 atas pelanggaran HAM di Timtim ketika terjadi eskalasi konflik dan keadaan darurat.³² Seiring dengan kemajuan negosiasi masalah Timtim antara pemerintah Indonesia dan Portugal, dan menurunnya tekanan Komisi HAM PBB, pada tahun 1985, serangan terhadap Delegasi DPR-RI dalam berbagai forum sidang IPU menurun. Tetapi, kondisi ini tidak bertahan lama, sehingga serangan terhadap Delegasi DPR-RI meningkat lagi tahun 1987 akibat mosi Parlemen Eropa yang mengkritik aneksasi dan menuntut *self-determination* Timtim. Kemudian, sejalan dengan meningkatnya pelanggaran HAM oleh aparat keamanan Indonesia, terutama dalam Insiden Santa Cruz, 12 Nopember 1991, kecaman terhadap Delegasi DPR-RI di fora IPU, semakin keras.³

Pasca-insiden Santa Cruz, Delegasi DPR-RI tidak dapat mencegah ataupun menganulir kritik terhadap kebijakan Indonesia di Timtim. Sebagai konsekuensinya, Delegasi DPR-RI yang menghadiri konperensi-konperensi IPU sesudahnya harus memiliki persiapan lebih berat lagi untuk menyiapkan data-data yang dapat menumbuhkan kembali kepercayaan internasional. Kesulitan semakin tinggi dihadapi Delegasi DPR-RI dalam menjalankan berbagai lobi untuk bisa membatalkan ataupun memperhalus bahasa resolusi ataupun klausul yang mengecam Indonesia.

Terkait isu Timtim, Delegasi DPR-RI di IPU dan fora multilateral lainnya harus menghadapi kritik, kecaman, dan usulan resolusi yang digagas negara besar seperti AS dan negara-negara Eropa, dan, bahkan, sesama negara berkembang atau Kelompok Selatan, seperti Brasil, Mozambique, Angola, dan lain-lain. Kemampuan Delegasi DPR-RI untuk membangun kubu yang mendukung posisi Indonesia melalui berbagai lobi di fora AIPO dan APPF sangat membantu posisi Indonesia di fora multilateral yang lebih luas, sebelum maupun sesudah jajak-pendapat (referendum) ditawarkan Presiden Habibie tahun 1999. Dalam kasus terakhir, yang terjadi di IPU ke-102 di Berlin, Jerman, misalnya, Delegasi DPR-RI di bawah kordinasi H.M. Dja'far Siddiq berhasil menggalang solidaritas melalui lobi yang intensif untuk menggagalkan pengajuan *emergency supplementary item* yang mengutuk Indonesia akibat kerusakan pasca-referendum.³

V. MEMPERJUANGKAN KEBEBASAN

Majelis Pengukuhan Profesor Riset, hadirin sekalian,

Jika dalam menghadapi isu HAM di Timtim, Delegasi DPR-RI tidak menghadapi kendala psikologis untuk merespons dengan sikap yang solid, karena mereka dapat menemukan *common enemy*, maka dalam masalah HAM atas pemecatan dan perlakuan buruk terhadap anggota DPR-RI yang dituding melakukan makar terhadap pemerintah Orba, muncul dilema. Karena, hal ini bisa berdampak pada nasib fraksi dan diri mereka sendiri, jika nantinya dituding sebagai anti-Orba, akibat sikap kritis mereka kepada pemerintah. Itulah sebabnya, Delegasi DPR-RI bersikap pasif dalam merespons kasus *recall* Sri Bintang Pamungkas, Megawati Sukarnoputeri, dan Aberson Marle Sihalohe. Delegasi DPR-RI tidak dapat menggagalkan sebuah resolusi yang dihasilkan IPU setebal 4 halaman penuh dalam sidang ke-158 *Inter-Parliamentary Council* IPU di Istanbul, Turki, pada 20 April 1996, yang isinya mengecam pelanggaran HAM atas beberapa anggota parlemen tersebut.³³

Kecaman terhadap Delegasi DPR-RI, yang dinilai tidak bersikap konstruktif menanggapi resolusi IPU itu, terus berlangsung hingga pelaksanaan berbagai forum IPU menjelang jatuhnya Soeharto. Ini membuat Delegasi DPR-RI yang hadir di fora IPU dalam periode akhir pemerintahan Soeharto (1997-1998) sebagai yang terburuk kinerjanya di panggung diplomasi internasional, karena tampak sekedar hadir memenuhi undangan saja daripada berinisiatif melakukan lobi untuk dapat mencegah *voting* dan pembuatan resolusi yang mengecam dan menekan Indonesia atas pelanggaran HAM yang telah terjadi.³

Kinerja yang mencolok dari Delegasi DPR-RI pasca-Orba dalam diplomasi internasional adalah upaya mereka dalam memperjuangan Palestina agar bisa menjadi anggota tetap IPU,

dan khususnya, membebaskan anggota parlemen mereka dari penjara dan blokade Israel, sehingga bisa mengikuti kegiatan IPU. Delegasi DPR-RI, yang masih diperkuat beberapa anggota dari periode sebelumnya dan pendatang baru yang memiliki kapasitas intelektual dan diplomasi baik, seperti Marzuki Darusman, Theo Sambuaga, dan Abdillah Toha, telah mendesak Komite Eksekutif IPU untuk membawa kasus Palestina tersebut ke sidang *Governing Council*, agar dapat diputuskan seluruh anggota IPU. Hasilnya, *voting* berhasil dilaksanakan di *Governing Council*, pada bulan Oktober 2008 untuk mengubah status IPU, sehingga afiliasi Palestina dapat diterima pada Sidang Umum IPU berikutnya, ke-120, di Addis Ababa, Ethiopia, 5-10 April 2009.²⁸

Sementara, melalui forum APA, dalam Sidang Pleno ke-3 di Jakarta, 26-29 Nopember 2008, kinerja mencolok yang diperlihatkan Delegasi DPP-RI adalah mengeluarkan resolusi yang merekomendasikan pembentukan *APA Troika Mission*.³⁴ Salah satu anggotanya adalah Ketua DPR-RI, yang bersama-sama dengan Ketua Parlemen Iran dan Ketua Parlemen Suriah, kemudian menindaklanjuti resolusi itu dengan menjalankan *on-sight mission* dan melakukan kordinasi untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan APA bagi rakyat Palestina di Jalur Gaza, yang ditutup Israel. Di luar itu, secara unilateral, Delegasi DPR-RI, terutama Komisi I, yang membidangi masalah-masalah luar negeri, pada 29 Juni 2010, mengambil langkah berani menembus blokade Israel atas Palestina, dengan mengunjungi Jalur Gaza melalui akses resmi satu-satunya di Mesir. Di sana, anggota Komisi I bertemu Parlemen dan PM Palestina dan kabinetnya. Mereka juga menyerahkan bantuan sebesar 2 juta dolar AS untuk pembangunan rumah sakit di Baetilya, Gaza bagian Utara.³⁵

Keberadaan Kaukus Palestina di DPR-RI amat mendukung kontinuitas dan intensitas diplomasi DPR-RI dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina di fora internasional. Karena itu, pasca-perang misil antara Israel-Hamas pada akhir Nopember 2012, Komisi I yang didukung Kaukus Palestina

mengirimkan kembali untuk kedua kalinya delegasi untuk datang ke Gaza, yang masih diblokade Israel.³⁶ Delegasi Komisi I dapat masuk ke Gaza melalui Mesir dan Jordania, menemui PM Palestina Ismail Haniyeh, Wakil Ketua Parlemen Ahmad Bahar, dan Presiden Mahmud Abbas. Misi kunjungan kali ini adalah memberikan dukungan politik bagi Palestina pasca-serangan misil Israel yang telah menewaskan ratusan orang di Palestina, mempersatukan kelompok Fatah dan Hamas dalam melawan Israel, dan memperlihatkan secara langsung dukungan Indonesia pada rakyat Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB dan negara merdeka.

Langkah diplomasi semacam ini efektif membuka Jalur Gaza dari isolasi total Israel. Sekalipun ada yang menilainya sebagai upaya nekad yang sangat berisiko, dalam kenyataannya, kunjungan itu tidak berakibat buruk pada seluruh anggota delegasi yang mengunjungi Gaza. Bahkan, para relawan Indonesia dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk ikut rombongan bus misi, membawa masuk bantuan obat-obatan dan uang bagi pembangunan rumah sakit di sana, setelah sebelumnya secara perorangan mereka gagal menembus blokade Israel. Bersama misi mereka yang dapat menembus Gaza, para anggota Komisi I dapat membawa bantuan uang dan obat-obatan untuk rakyat Palestina untuk melanjutkan pembangunan rumah sakit yang telah didirikan atas inisiatif DPR-RI.³⁷ Namun, kritik muncul, karena di dalam negeri banyak pekerjaan rumah belum terselesaikan, termasuk dalam mendamaikan anak bangsa yang bertikai karena masalah agama, etnik, dan separatisme.

Sebelum ini, di berbagai fora internasional, baik di PBB, para anggota DPR-RI gigih membela Iran dalam merealisasikan haknya mengembangkan energi nuklir untuk pembangunan. Mereka juga gigih menentang setiap ancaman aksi serangan militer atas Iran. Mereka membela Iran dalam menentang isolasi negaranya dan pemberlakuan embargo ekonomi. Dukungan atas penyelenggaraan berbagai sidang komisi dan Majelis Umum

APA yang sering dilakukan di Indonesia adalah manifestasi dari besarnya komitmen DPR-RI mendukung Iran dalam menjalankan politik luar negeri alternatifnya menggalang kekuatan menentang embargo dan isolasi AS dan Barat.¹⁴ Upaya ini berdampak pada tingginya intensitas kunjungan luar negeri dan aktifitas anggota dan pimpinan DPR-RI ke Iran, dan sebaliknya, anggota dan pimpinan parlemen Iran ke Indonesia, sekaligus munculnya kritik bahwa DPR-RI menari di tengah irama musik yang dimainkan Iran, yang tengah membangun koalisi anti-AS.³⁴

Sebagai bagian dari perjuangan diplomasi parlemen di fora internasional, anggota DPR dari Fraksi PKS mengambil inisiatif mengunjungi Myanmar, untuk merespons gelombang aksi kekerasan dan pelanggaran HAM lainnya atas Muslim Rohingya. Dengan biaya sendiri, Hidayat Nur Wahid, Muzammil Yusuf, Sapto Waluyo dan lain-lain melakukan kunjungan ke parlemen dan pemerintah Myanmar, mencoba melakukan pendekatan untuk memberikan solusi yang mendukung hak-hak kaum minoritas Rohingya tersebut.³⁸ Seperti dalam isu pelanggaran HAM rakyat Palestina, Fraksi PKS sangat proaktif dalam memperjuangkan nasib kaum Muslim di berbagai belahan dunia. Komisi 1 DPR-RI tidak tinggal diam, karena kemudian beberapa anggotanya, dipimpin Ketua Komisi 1, Mahfudz Siddiq, yang juga dari Fraksi PKS, melakukan kunjungan serupa, dengan misi mendorong Pemerintah Myanmar agar melaksanakan rekomendasi pertemuan OKI di Mekkah pada 5-6 Agustus 2012 untuk memperbaiki nasib penduduk minoritas Muslim Rohingya.³⁹

Seiring langkah ini, Ketua DPR-RI, Marzuki Alie, yang masih menjabat sebagai Ketua AIPA, telah mengirimkan surat secara resmi kepada Pemerintah Myanmar, yang mempertanyakan kebijakannya terhadap Muslim Rohingya. Sedangkan Ketua BKSAP, Surahman Hidayat, mengirim surat terbuka ke *Republika*, yang isinya, himbauan kepada Pemerintah dan Parlemen Myanmar, khususnya untuk tokoh demokrasi Aung San Suu Kyi, agar menghentikan kekerasan dan berbagai pelanggaran HAM, serta

memperhatikan nasib penduduk minoritas itu.¹⁶ Sehingga, sebuah kombinasi diplomasi elit dan publik dilakukan secara simultan, yang tentu saja membutuhkan biaya yang tidak sedikit, termasuk untuk pemuatan surat terbuka di media massa. Di samping itu, upaya diplomasi ini bukan tidak luput dari kritik masyarakat, mengingat di dalam negeri nasib kelompok minoritas, bahkan yang juga mengklaim sebagai Muslim, masih belum memperoleh perlindungan dan perhatian yang memadai.

Langkah diplomasi di atas memang tidak langsung menuai hasil yang optimal, mengingat sikap Pemerintah Myanmar masih mendua, dan aksi kekerasan selanjutnya tetap berlangsung. Diplomasi internasional parlemen sendiri masih tampak terlalu lembut, sehingga tidak memanfaatkan fora Sidang Umum AIPA ke-33 di Lombok 2012 untuk mengeluarkan resolusi yang menekan Myanmar agar menjamin penghentian pelanggaran HAM dan memberikan hak-hak dasar Rohingya sebagai warga negara, sebagaimana halnya atas penduduk Myanmar lainnya.¹⁶ Kultur dan sikap *ewuh-pakewuh* telah menyebabkan Delegasi DPR-RI di Sidang Umum AIPA di Lombok pada 16-22 September 2012 tidak dapat mencapai hasil optimal dalam menjalankan diplomasi parlemen, bahkan, di kawasan terdekat, yakni Asia Tenggara, melalui ASEAN/AIPA.⁴⁰

VI. MEMBELA KEHORMATAN BANGSA

Majelis Pengukuhan Profesor Riset, hadirin sekalian,

Melalui kunjungan kerja luar negeri, yang dapat dilakukan pada masa sidang ataupun reses, di negara-negara yang bermasalah, seperti Malaysia, Saudi Arabia, dan Jordania, anggota DPR-RI mengunjungi kantor Kedutaan Besar (Kedubes) RI, yang juga memiliki tempat penampungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Di negara-negara itu, anggota DPR-RI yang berkunjung dapat meminta penjelasan dari pihak Kedubes mengenai kondisi TKI, dan memperoleh informasi secara langsung dari para TKI yang telah melarikan diri dari rumah majikan mereka mengenai penganiayaan ataupun pelanggaran hukum lainnya yang telah mereka alami, seperti tidak memperoleh bayaran yang layak, pelecehan seksual dan lain-lain.⁴¹ Sekaligus, anggota DPR-RI dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk bertemu dengan pihak pemerintah setempat untuk membicarakan respons dan penanganan bersama atas TKI yang disiksa, tidak dibayar, dan bermasalah.

Dalam hal ini, tidak hanya Komisi DPR-RI (Komisi 9) yang membahas masalah tenaga kerja saja yang melakukan aksi diplomasi penanganan TKI bermasalah, namun juga komisi luar negeri (Komisi 1), ataupun anggota Pansus (Panitia Khusus) yang tengah membahas RUU mengenai TKI. Upaya misi pencari fakta dapat dikirimkan ke negara yang ada kasus. Sementara, sebelum maupun sesudah keberangkatan ke luar negeri, anggota DPR-RI dapat terus melancarkan kritik mengenai perlakuan pihak-pihak di mancanegara yang tidak melindungi TKI, sambil menekan pemerintah sendiri (Kemlu) untuk meningkatkan lobi ataupun tekanan ke pemerintah negara yang bermasalah. Abdul Ghafur dan kawan-kawan dari Komisi 1 dan BKSAP, telah berinisiatif mencari tahu nasib TKI yang telah dilaporkan

disiksa, serta membantu perlingkungannya. Mereka juga mencoba melobi Parlemen Malaysia untuk menekan pemerintahnya menyelesaikan sengketa Pulau Ambalat secara damai.⁴²

Upaya membela kehormatan bangsa secara langsung pernah pula diperlihatkan anggota Komisi 1 DPR-RI dengan ikut melakukan unjuk kekuatan di lapangan bersama TNI AL, dengan menggunakan kapal perang (KRI). Walaupun belum dapat dikatakan sebagai *gun boat diplomacy*, namun langkah ini tampak efektif ketika dilaksanakan.¹⁴ Sebab, unjuk rasa di atas kapal perang yang tampak emosional dan langsung berhadapan dengan kapal perang dan AL Malaysia yang diperlihatkan Effendy Choirie dan kawan-kawan, telah berhasil mencegah aksi kapal perang Malaysia mengganggu lebih lanjut upaya pekerja Indonesia membangun mercusuar di atas pulau karang yang diperebutkan, yaitu Ambalat.

Berbeda dengan beberapa contoh di atas, aksi diplomasi langsung, yang juga bersifat unjuk kekuatan berikut ini tidak direncanakan dari tanah air. Aksi ini dilakukan spontan dan seorang diri oleh Sutradara Gintings di Kamboja pada acara makan malam, se usai mengikuti kegiatan Komisi HAM AIPA membahas ratifikasi dan implementasi Konvensi Anti-Penyiksaan dan keadilan transisional selama transisi demokratis. Anggota Komisi 1 dan juga BKSAP DPR-RI itu lebih dulu ke panggung untuk menyanyikan lagu daerah Indonesia, "Rasa Sayange", setelah mengetahui anggota Delegasi Malaysia telah meminta waktu ke MC (*Master of Ceremony*) akan membawakan lagu itu dalam acara budaya antar-negara peserta. Aksi diplomasi budaya di panggung yang dilakukan dadakan ini, sekalipun hanya oleh seorang aktor diplomasi, telah membuat *shock* Delegasi Parlemen Malaysia, sehingga mereka mengurungkan niat menyanyikan lagu tersebut, yang selama ini telah diklaim sebagai lagu negaranya.¹⁴

VII. EVALUASI PERAN

Majelis Pengukuhan Profesor Riset, hadirin sekalian,

Di balik keberhasilan menduduki posisi-posisi penting di organisasi parlemen internasional, kinerja Delegasi DPR-RI dalam fora internasional masih memiliki banyak kelemahan.¹⁶ Kelemahan ini disebabkan penguasaan informasi dan kecakapan yang terbatas dalam memahami hubungan internasional,⁴³ berbahasa asing, dan melakukan diplomasi, selain karena memiliki persiapan yang tidak memadai.⁴⁴ Latar belakang pendidikan para pelaku diplomasi yang tidak mendukung, keinginan untuk mendalami masalah-masalah hubungan internasional yang rendah,⁴⁵ kurangnya spirit untuk memperjuangkan kepentingan nasional, serta lemahnya dukungan ahli sebagai bagian sistem pendukung di parlemen⁴⁶ merupakan penyebab lemahnya kapabilitas anggota Delegasi DPR-RI, yang berdampak pada terbatasnya capaian kerja substansial mereka. Padahal diketahui, sejak dalam dalam perkembangannya yang masih primitif, dalam praktek diplomasi primitif yang dilakukan para pembawa pesan dari berbagai kelompok suku dan kerajaan dulu, apalagi diplomasi modern dewasa ini, dibutuhkan kepandaian, intelegensi, taktik, dan keahlian,⁸ yang harus ditempa melalui persiapan yang baik (terorganisasi),⁴⁷ pendidikan, pelatihan, dan pengalaman-pengalaman. Semakin tinggi semua kapabilitas itu dimiliki suatu negara akan semakin besar peluang untuk memenangkan negosiasi di berbagai fora internasional. Sebaliknya, kemampuan yang rendah akan menyebabkan para anggota parlemen tidak hanya merusak negosiasi internasional yang tengah diperjuangkan, tetapi juga ketidakberdayaan mereka sebagai mediator dalam memperjuangkan kepentingan negara yang maksimal di berbagai fora internasional.⁴⁸ Karena, keberhasilan sebuah diplomasi internasional sangat bergantung pada faktor diplomat yang menjalankan misinya.⁸

Menyadari besarnya anggaran negara yang dikeluarkan untuk setiap perjalanan luar negeri Delegasi DPR-RI, yang mencapai milyaran Rupiah untuk delegasi 10-15 orang untuk masa kunjungan 7 hari,²⁰ sangat disayangkan, jika kebanyakan anggota delegasi hadir tanpa mempunyai keinginan untuk menjadi peserta aktif, yang dapat menyumbangkan pikiran dan memformulasikan kebijakan yang menguntungkan kepentingan nasional.¹⁴ Anggota DPR-RI harus menyadari bahwa prestasi sebagai tuan rumah, apalagi berkali-kali, konferensi internasional tidak sepenuhnya merupakan kebanggaan, karena diketahui, banyak negara yang enggan menyelenggarakan *event* internasional akibat pembiayaan yang sangat besar dan tidak banyak dampak positif langsung yang dapat dinikmati negara, apalagi untuk rakyat mereka.²⁹ Sementara, untuk bisa melakukan *total diplomacy* dan *multitrack diplomacy* dengan keterlibatan lebih intensif parlemen sebagai pelaku *second track diplomacy* dibutuhkan banyak persyaratan dari sekedar kinerja dan prestasi yang apa adanya.¹⁶ Tidak perlu malu diakui, hanya sedikit anggota DPR-RI yang mempunyai kapabilitas yang tinggi untuk melakukan diplomasi internasional.³ Bahkan, mereka masih sangat tergantung pada staf ahli untuk masalah dasar, seperti penguasaan bahasa internasional (Inggris, Prancis, Arab, dan lain-lain), prosedur persidangan, dan praktik-praktik diplomasi internasional.⁴⁹

Keterbatasan kapabilitas untuk melakukan diplomasi internasional telah berdampak pada tidak mampunya Delegasi DPR-RI, misalnya, untuk meningkatkan peran forum *Asia-Pacific Group* (APG) dalam membantu menyelesaikan konflik kawasan, yakni konflik Laut Cina Selatan.¹⁴ Lagi-lagi, kurangnya kemampuan dalam berbahasa internasional dan pengalaman dalam melakukan diplomasi internasional telah menghambat Delegasi DPR-RI untuk bisa mengangkat peran APG dalam pertemuannya di Jakarta pada Agustus 2011, untuk meredam konflik di kawasan, sehingga tidak dapat meringankan tugas PBB, sebagaimana yang diharapkan dulu oleh Sekretaris Jenderalnya,

Boutros-Boutros Ghali.⁵⁰ Kondisi ini pula yang membuat sulitnya Delegasi DPR-RI bisa mendorong AIPA melakukan transformasi lebih cepat menjadi sebuah institusi parlemen kawasan yang lebih produktif dan efektif kinerjanya.⁵¹ Sehingga, selama beberapa dasawarsa, AIPA hanya bisa menghasilkan lebih dari 400 resolusi, dengan ribuan lembar halaman, yang tidak bisa diimplementasikan, sehingga ia dikritik menyerupai *talk shops*, dan belum mampu mentransformasikan dirinya menjadi sebuah Parlemen ASEAN.⁵²

Kehadiran diplomat Kemlu sebagai penasehat dapat membantu peningkatan kinerja diplomasi internasional Delegasi DPR-RI. Namun, tanpa tumbuhnya integritas Delegasi DPR-RI sebagai wakil rakyat Indonesia, dan berkembangnya sikap liberal mereka sebagai politisi yang memiliki kapabilitas yang sepadan, peran diplomat Kemlu akan terus cenderung menggurui, dan bukan sebagai mitra kerja yang sejajar, yang bisa bersinergi memperjuangkan kepentingan nasional. Kehadiran penasehat dari Kemlu bisa juga membuat anggota parlemen menjadi minder atau risih dalam mengungkapkan pandangan politiknya. Karena itu pulalah, untuk dapat memperoleh hasil diplomasi internasional yang maksimal, semangat paguyuban yang tidak berorientasi pada target, efektifitas, serta akuntabilitas, harus disingkirkan.²⁰ Masalah ini makin harus bisa diatasi ketika anggota Delegasi DPR-RI mengklaim dirinya memiliki pandangan ideologi tertentu, misalnya sosialis dan Islamis, yang harus memiliki solidaritas internasional.⁵³

Di masa Orba, kehadiran pendamping, yang berstatus sebagai penasehat delegasi, juga untuk tujuan dapat "mengontrol" anggota DPR-RI yang vokal, sulit dikendalikan, atau cenderung liberal dan *nyeleneh* di fora internasional. Karena itu, tidak heran, atase pertahanan atau militer KBRI, tidak hanya mereka yang berstatus diplomat, seperti Sekretaris Politik dan pimpinan KBRI, juga berminat mendampingi Delegasi DPR-RI. Upaya kontrol politik atau sikap saling mencurigai tidak boleh ada lagi,

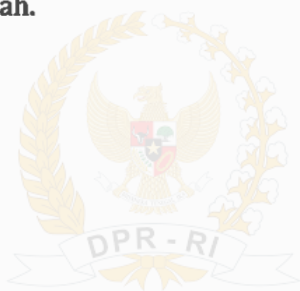
karena kini sistem demokrasi kita sudah terbuka dan dinilai oleh publik.⁵⁴

Di lapangan, delegasi parlemen Indonesia seringkali terjebak dalam reaksi yang emosional, akibat gagal memahami bahwa seorang diplomat internasional harus memperlihatkan respons yang standar dan elegan. Kompetisi yang tidak sehat dan sikap bias jender juga masih muncul,⁵⁵ termasuk dalam penyusunan anggota delegasi dan menentukan pemimpin atau wakil fraksi dalam kegiatan di fora internasional. Itulah sebabnya, beberapa kali muncul sikap yang berbeda di kalangan delegasi dalam mengambil keputusan. Ini tentu saja memalukan, karena delegasi tidak bisa memperlihatkan sikap yang solid untuk menentukan dan mempertahankan kepentingan nasional di depan masyarakat internasional. Sebagai contoh, konflik antara delegasi DPR-RI dan DPD dalam mengklaim siapa seharusnya yang pantas mewakili parlemen Indonesia dalam Sidang Umum AIPA di Viet Nam pada tahun 2010.⁵⁶

Yang lebih buruk, dalam *event* yang lebih luas, yakni Sidang Umum IPU ke-125 di Bern, Swiss, tahun 2011, konflik di forum internasional terjadi antara Delegasi DPR-RI dan seorang anggota delegasi perempuan DPR-RI yang berniat mencalonkan diri sebagai Presiden *IPU Council*. Delegasi DPR-RI bersepakat untuk tidak mendukung anggota delegasi perempuan tersebut untuk meraih kursi kepemimpinan tertinggi di IPU. Padahal diketahui, anggota parlemen perempuan tersebut dapat terpilih menjadi Presiden *IPU Council*, jika Delegasi DPR-RI memberikan dukungan utuh, yang selisihnya hanya 7 suara dari pesaingnya, anggota parlemen laki-laki asal Maroko!⁵⁷

Sangat aneh, dukungan suara justru diberikan lebih banyak oleh Delegasi DPR-RI untuk kandidat Presiden *IPU Council* dari parlemen Maroko, untuk alasan dan kepentingan yang terlalu sederhana, yaitu kekhawatiran tidak datangnya delegasi parlemen negara si pesaing itu dalam konperensi dengan lingkup yang lebih kecil, yakni APA di Palembang, beberapa bulan sesudahnya.

Peluang besar yang sulit terulang lagi setelah tiga dasawarsa lebih kehadiran Indonesia dalam forum-forum IPU, yakni didukungnya secara mayoritas oleh masyarakat internasional seorang anggota parlemen perempuan Indonesia menjadi orang nomor satu di IPU, hilang sudah.



VIII. KESIMPULAN

Majelis Pengukuhan Profesor Riset, hadirin sekalian,

Dalam dunia yang berkembang pesat dewasa ini, akibat kian derasny arus globalisasi, aktifitas diplomasi internasional semakin luas, seiring dengan bertambahnya aktor-aktor yang terlibat. Kehadiran parlemen sebagai pemangku kepentingan diplomasi alternatif, akan semakin diperlukan, sebagai bagian dari *total diplomacy*. Praktek diplomasi total menjadi tidak terhindarkan karena masalah kompleks yang dihadapi dewasa ini. Ini membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan untuk menangani isu lintas sektoral, yang membutuhkan langkah kreatif dan inovatif.

Sejauh ini, dapat dinilai, peran DPR-RI sebagai pelaku jalur satu diplomasi internasional belum efektif dan maksimal. Karena itu, perbaikan atas kinerja parlemen Indonesia di fora internasional harus dilakukan. Keterlibatan yang efektif dan maksimal DPR-RI sebagai pelaku jalur dua diplomasi akan dapat lebih membantu peran pemerintah di jalur satu. Bersama dengan pelaku jalur tiga, kalangan bisnis, dan empat, yakni warga negara biasa, para anggota DPR-RI dapat menghasilkan sinergi yang besar dalam mendukung pelaksanaan diplomasi di berbagai jalur, demi menghasilkan sebuah diplomasi total untuk pencapaian kepentingan nasional. Di masa depan, para anggota DPR-RI harus dapat berkontribusi lebih besar dalam mengimplementasikan diplomasi koersif, diplomasi pencegahan, diplomasi pasar, diplomasi budaya, diplomasi rahasia, diplomasi konperensi, dan lain-lain.

Mengingat begitu mahalny biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan diplomasi di fora internasional pada umumnya, diperlukan evaluasi kinerja para anggota DPR-RI di fora internasional yang lebih dalam. Kehadiran anggota parlemen di

arena diplomasi internasional harus dipersiapkan dengan baik, agar memberikan nilai tambah yang signifikan dan bersinergi dengan berbagai langkah diplomasi internasional yang dilakukan pemerintah. Keterlibatan mereka dalam arena diplomasi internasional tidak boleh hanya dimotivasi solidaritas ideologi, apalagi karena sikap reaktif atau naif, sehingga seringkali tanpa disadari menari di atas tabuhan genderang negara lain, yang landasan perjuangan dan kepentingannya berbeda.

Anggota parlemen Indonesia harus memiliki keinginan yang tinggi untuk dan mampu berkompetisi secara sehat memimpin organisasi-organisasi parlemen internasional dan berperan besar dalam menentukan kebijakan dunia, tidak lagi sebagai pembawa pesan biasa di panggung internasional. Karenanya, mereka harus dapat meningkatkan kapasitas, penampilan, dan kinerja individual mereka. Hambatan kultural, seperti sungkan dan kurang inisiatif dalam menyampaikan pendapat, harus ditinggalkan, diganti dengan sikap yang memiliki pencapaian target. Sehingga, diplomasi parlemen di dunia internasional tidak lagi untuk tujuan pencitraan yang semakin banyak menciptakan paradoks di dalam negeri, yakni sebagai kegiatan berbiaya tinggi, tetapi hasilnya minim, melainkan memiliki target tertentu yang rasional.

Masalah-masalah di dalam, seperti konflik DPR-RI dan DPD-RI, dan juga perbedaan pandangan di antara individu anggota parlemen, harus dapat diselesaikan lebih dulu sebelum mereka menghadiri fora internasional. Yang lebih penting lagi, anggota Delegasi DPR-RI harus memahami kepentingan nasional yang harus dicapai. Di dalam, di antara para aktor diplomasi internasional boleh terdapat perbedaan pendapat, namun keluar, di arena internasional, pandangan yang satu harus ditunjukkan. Sebab, yang dihadapi adalah lawan bersama, yang harus ditaklukkan, dipengaruhi, atau dapat diajak kerja sama untuk mendukung kepentingan Indonesia.

IX. PENUTUP

Majelis Pengukuhan Profesor Riset, hadirin yang saya muliakan,

Banyak orang tertarik dan antusias membicarakan masalah internasional, namun untuk bisa terlibat dan mempengaruhi, apalagi secara mendalam, diperlukan kapabilitas yang tinggi. Anggota DPR-RI, sebagai konsekuensinya, harus mempunyai kecakapan dan mempersiapkan diri dengan baik sebelum berangkat ke arena diplomasi internasional. Sehingga, mereka dapat melakukan negosiasi dengan baik dengan banyak aktor hubungan internasional untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan internasional.

Datang tanpa persiapan dan target, apalagi dengan capaian kinerja yang rendah, tidak boleh diteruskan. Demikian halnya, dengan upaya menjadikan diplomasi internasional sebagai sekadar instrumen atau arena untuk pencitraan individu dan kelompok (fraksi), untuk pamer heroisme. Sebab, sikap tanpa tujuan dan naif, bisa menghasilkan kritik dan penolakan dari negara tuan rumah yang akan dituju sebagai sasaran diplomasi internasional, seperti dalam perkembangan belakangan atas kasus Palestina, yang Presidennya sendiri, Mahmoud Abbas, telah menghimbau agar pemimpin dunia tidak lagi mengunjungi Jalur Gaza, karena dikuatirkan kian memperdalam perpecahan di dan melemahkan negara itu.

Cara atau budaya kerja, selain kapasitas individu, dan kondisi sistem pendukung parlemen, juga harus diperbaiki, agar upaya mencapai target kepentingan nasional di dunia internasional di masa depan dapat lebih optimal dilakukan. Hanya dengan langkah perbaikan komprehensif, pencapaian target optimal ini dapat dipenuhi, seiring kian meningkatnya peran diplomasi publik. Dengan demikian, para anggota DPR-RI dapat memperlihatkan kehadiran mereka sebagai aktor internasional baru yang berarti

dalam arena diplomasi dunia yang semakin beragam jalurnya, untuk dapat membantu pemerintah yang semakin terbatas kemampuannya.



UCAPAN TERIMA KASIH

Ijinkanlah saya menyampaikan ucapan terima kasih saya pertama-tama kepada kedua orang tua saya yang telah menyadarkan saya sejak dini tentang pentingnya membaca dan memperkenalkan saya pada dunia politik yang riil. Selanjutnya, sebelum kepada para guru besar dan senior saya, perkenankan saya lebih dulu menyampaikan terima kasih pada guru-guru saya di sekolah dasar, menengah, dan atas. Kepada Sance L. Malle di SD yang membangun rasa percaya diri saya, Aisyah Rachim Natsir dan Wahyunarah serta Asrul Chatib di SMA yang mendorong kemampuan saya untuk berkembang dan memperkaya saya dengan ilmu sejarahnya. Begitu pula pada Sianturi di SMP yang mengajak saya melanglang buana dengan mata pelajaran sejarahnya, serta W. Erman AP yang masih menilai pentingnya kejujuran dalam belajar, dan Sugiharto, juga di SMP, yang tanpa disadari telah memperkenalkan saya pada dunia riset melalui mata pelajaran biologinya. Demikian pula pada R. Damar, yang telah mengirim saya ke kompetisi penulisan masalah lingkungan hidup yang diadakan oleh *World Wild Fund (WWF)* di tahun 1976, yang telah meletakkan dasar yang kuat bagi saya ketika terjun di dunia riset di kemudian hari.

Sekarang waktunya saya menyampaikan ucapan terima kasih pada Prof. Dr. Juergen Rueland, Kepala *Seminar fuer Wissenschaftliche Politik* dan Dr. Stephan Rother di *Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg*, dan para kolega di *Arnold-Bergstraesser Institut*, Freiburg, Baden Wuerttemberg, Jerman, untuk diskusi-diskusi mereka yang produktif tentang hubungan internasional di kawasan. Secara khusus, penulis menyampaikan terima kasih pada *Hanss Seidel Stiftung*, Muenchen, Bayern, dan Perwakilan Jakarta, terutama Christian Hegemer, Dr. Michael Czepalla, dan Dr. Ulrich Klingshirn, yang telah memberikan bea siswa,

sehingga memungkinkan penulis menyelesaikan studi doktoral dan menyiapkan orasi pengukuhan profesor riset ini, dan sejak awal terlibat secara mendalam dan mendukung berbagai diskusi dan penelitian mengenai parlemen dan integrasi politik di kawasan. Untuk Dr. Andreas Ufen dan Dr. Patrick Ziegenhein dkk, para Indonesianist di Jerman, yang rajin mengunjungi DPR dan P3DI untuk riset-riset mereka, saya tidak lupa menyampaikan terima kasih karena banyak terbantu dengan debat-debat yang mendalam dan perspektif mereka. Ucapan terima kasih juga untuk Dr. Manfred Lohmann, Prof. Dr. Klaus Pehler, Guenter Wehner, dan Hruschka dari *Konrad Adenauer Stiftung*. Juga untuk para kolega Dr. Gordon Hein dan Ralph Monjo di *the Asia Foundation*, untuk bantuan pendidikan dan latihan di awal berdirinya Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR-RI, serta pada Kedutaan Besar Prancis, untuk kursus Bahasa Prancis yang pernah diberikan cuma-cuma selama beberapa tahun.

Kemudian, saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih pada pimpinan DPR-RI, yang mengharapakan DPR-RI yang semakin hari semakin kuat dengan pengembangan SDM sistem pendukung keahliannya. Demikian pula kepada Pimpinan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), Komisi 1, BKSAP, dan BAKN yang mendambakan selalu tersedianya dukungan keahlian yang kuat di parlemen, termasuk untuk masalah-masalah hubungan internasional yang saya selalu cermati dan kordinasikan pelayanannya selama ini melalui P3DI Sekretariat Jenderal DPR-RI. Pada nama-nama mantan anggota DPR seperti Prof. Dr. Katili (alm), Dr. Marwah Daud Ibrahim, Prof. Dr. Burhan Magenda, yang memperkenalkan saya pada *comparative politics* dan studi kawasan, Dr. Ir. Akbar Tandjung dkk serta Kemal Stamboel dkk yang mengharapakan hadirnya sebuah institusi riset di parlemen (DPR-RI) setara dengan *Congressional Research Services* (CRS) di AS, saya sampaikan hormat dan penghargaan saya yang besar.

Pengajuan orasi ilmiah dan pengukuhan saya sebagai Profesor Riset untuk masalah-masalah hubungan internasional ini dapat terlaksana dengan dukungan Sekretariat Jenderal DPR-RI dan LIPI. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih pada Sekretaris Jenderal DPR-RI, yang lama, Dra. Nining Indra Shaleh, M.Si, dan juga Sekretaris Jenderal DPR-RI yang baru, Dr. Winantuningtyastiti S., M.Si., dan Wakil Sekretaris Jenderal DPR-RI, Achmad Djuned, SH, M.Hum, Dra. Setyorini, M.Si, yang memberikan dukungan atas pengembangan SDM fungsional, terutama peneliti, di parlemen (DPR-RI). Secara khusus, saya menyampaikan rasa hormat saya pada Aurora Simandjuntak, yang menjadi salah satu perintis berdirinya P3DI, yang mengingatkan saya untuk terus menanam dan menempa diri dengan ilmu pengetahuan. Juga kepada Prof. Dr. Juwono Sudarsono, Prof. Dr. Maswadi Rauf, Arbi Sanit, Prof. Dr. Hero Kuncorojakti (alm), Prof. Dr. Zainuddin Djafar, Prof. Dr. Prijono Tjiptoherjanto, Faisal H. Basri, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, Prof. Dr. Erman Radjaguguk, dkk, yang menjadi guru dan sekaligus mitra kerja kami sebelum P3DI dapat berkembang seperti sekarang ini.

Saya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Majelis Profesor Riset, terutama tim pemeriksa naskah orasi ilmiah ini di LIPI, yaitu kepada Kepala LIPI selaku Ketua Majelis Pengukuhan Profesor Riset, Prof. Dr. Lukman Hakim, MSc, Apt, dan Sekretaris Majelis, Prof. Dr. Aswatini, serta para Anggota Majelis, yakni Prof. Dr. Dewi Fortuna Anwar, Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti, dan Prof. Dr. Erman Aminullah, serta Kapusbindiklat Peneliti-LIPI, Prof. Dr. Enny Sudarmonowati, yang telah memberikan berbagai kritik dan saran untuk naskah orasi profesor riset penulis.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada teman-teman peneliti di P3DI, yang selama ini telah memberikan semangat untuk dapat terlaksananya penyampaian orasi ilmiah ini. Di sana juga ada tim paduan suara yang juga peneliti dan serta mereka yang terlibat dengan urusan teknis pelaksanaan orasi ini.

Terima kasih banyak untuk para kolega dari unit-unit di luar P3DI, terutama protokol dan humas, yang telah membantu dapat terselenggaranya pengukuhan Profesor Riset untuk pertama kalinya di Gedung DPR-RI ini. Terima kasih untuk setiap teman dan kolega yang telah membantu, namun tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.

Mata saya selanjutnya tertuju pada 2 perempuan yang menjadi sumber inspirasi dan motivasi dalam hidup saya untuk terus berkarya tanpa lelah. Mereka adalah isteri saya, Riris Katharina, S.Sos, M.Si, yang terus berjuang untuk menyelesaikan studi S-3-nya, dan Reynnalda(Nalda) Alisha, yang telah hadir sebagai bagian dari generasi baru Indonesia dalam era demokratis tanpa konsolidasi ini. Berpikir tentang masa depan generasi baru Indonesia dalam masa transisi berkepanjangan inilah yang membuat semangat saya tidak akan pernah padam. Akhirnya, pada parlemen (DPR-RI), tempat saya bekerja selama lebih dari dua dasawarsa ini, yang diharapkan perbaikan kinerjanya oleh masyarakat untuk menjadi lebih baik lagi, saya persembahkan orasi ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- 1 Daniel S. Papp. *Contemporary International Relations: Framework for Understanding*. Macmillan, 1997.
- 2 Poltak Partogi Nainggolan. "An ASEAN Parliament in the Region?" makalah untuk diskusi the Association of Southeast Asia Students of the Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg, di the Arnold-Bergstraesser Institut (ABI), Freiburg, 2009, tidak diterbitkan.
- 3 Poltak Partogi Nainggolan. *Kinerja DPRRI dalam Inter-Parliamentary Union*. Jakarta: P3I, 2000.
- 4 Ruhut Ambarita. "Studi Banding Bukan Darmawisata Keluarga." *Sinar Harapan online*, 27 April 2012, <http://www.shnews.co/detile-1075-studi-banding-bukan-darmawisata-keluarga.html>, diakses pada 20 Juli 2013.
- 5 Poltak Partogi Nainggolan. "The Role of Plenary Meeting," makalah presentasi untuk *The Third International Seminar for Parliamentary Research Services in Asia*, National Assembly Research Service (NARS), Seoul, South Korea, 2012.
- 6 Ragnar Numelin. *The Beginnings of Diplomacy: A Sociological Study of Intertribal and International Relations*. London: oxford, 1950.
- 7 David D. Newsom. *Dimensi Publik Politik Luar Negeri*. (terj.) *Public Dimension of Foreign Politics*. Bandung: Angkasa, 1996.
- 8 SL Roy. *Diplomasi*. (terj.) *Diplomacy*. Jakarta: Rajawali, 1991.
- 9 Jusuf Badri. *Kiat Diplomasi: Mekanisme dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Sinar Harapan, 1994.

- 10 G.R. Berridge. *Diplomacy: Theory and Practice*. New York: Prentice-Hall, 1995.
- 11 R.P. Barston. *Modern Diplomacy*. UK: Longman, 1988.
- 12 Poltak Partogi Nainggolan. "Matinya Hati Nurani (Wakil) Rakyat." *Media Indonesia*, 13 September 2007.
- 13 Poltak Partogi Nainggolan. "Rasionalkah Keinginan DPR Menaikkan Gaji?" *Parlemen.net*, Pusat Informasi Proses Legislasi Indonesia, PSHK, <http://www.parlemen.net/site/> March 22., 22 Maret 2005.
- 14 Poltak Partogi Nainggolan et al. *Inter-Parliamentary Union dan Agenda Global Abad 21*. Jakarta: P3I Sekretariat Jenderal DPR-RI, 2011.
- 15 Poltak Partogi Nainggolan. "Parlemen dan Defisit Demokrasi." *Forum Keadilan* No. 33, 24 Desember 2006.
- 16 Poltak Partogi Nainggolan et al. *Diplomasi Parlemen di Asia Tenggara: Spektrum Kepemimpinan Indonesia di ASEAN Inter-Parliamentary Assembly 2011-2012*. Jakarta: BKSAP, 2012.
- 17 "Studi Banding Anggota DPR Seharusnya Sangat Selektif." *Republika Online*, 18 September 2010, <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/10/09/18/135297-studi-banding-anggota-dpr-seharusnya-sangat-selektif>, diakses pada 20 Juli 2013.
- 18 Elvan Dany Sutrisno. "Fitra: DPR Tak Tahu Malu Pelesiran ke Luar Negeri," *Detik.News*, 20 Juni 2012, <http://www.news.detik.com/2012/06/20/123703/1946033/10/fitra-dpr-tak-tahu-malu-pelesiran-ke-luar-negeri>, diakses 20 Juli 2013.
- 19 Poltak Partogi Nainggolan. "Parlemen dan *Take Home Pay*." *Media Indonesia*, 26 Oktober 2005.

- 20 Poltak Partogi Nainggolan. "Parlemen dan Milenium Baru." *Parlementaria*, Th XLII, 2012.
- 21 Fiddy Anggriawan. "Naif Anggota DPR ke Venezuela Bahas RUU Desa." *Okezone*, 22 Juni 2012, <http://www.jakarta.okezone.com/read/2012/06/22339/652030/naif-anggota-dpr-ke-venezu-ela-bahas-ruu-desa>, diakses 20 Juli 2013.
- 22 Inggried Dewi Wedhaswary. "DPR Bantah Jalan-jalan di Luar Negeri." *Kompas.com*, 23 Oktober 2010, <http://www.nasional.kompas.com/read/2010/10/23/11073329/DPR.Bantah.Jalan.jalan.di.Luar.Negeri>, akses 20 Juli 2013.
- 23 Poltak Partogi Nainggolan et al. *ASEAN dan AIPA dalam Kawasan yang Berubah*. Jakarta: P3I Sekretariat Jenderal DPR-RI, 1996.
- 24 Poltak Partogi Nainggolan et al. *Twenty Five Years ASEAN Inter-Parliamentary Organization*. Jakarta: AIPO Secretariat General, 2003.
- 25 Poltak Partogi Nainggolan et al. *AIPO 20 Years: ASEAN Inter-Parliamentary Organization*. Jakarta: Setjen DPR-RI, 1997.
- 26 Poltak Partogi Nainggolan. "Menuju Pembentukan Parlemen ASEAN." *Analisis*, CSIS, Vol. 36, No. 4/Desember 2007.
- 27 Hasil-hasil Sidang Umum ke-116 IPU dan Sidang-sidang terkaitnya di Bali, Indonesia, pada 29 April-4 Mei 2007, di IPU website: <http://www.ipu.org/con-e/116/1Cmt.conf.pdf>, diakses pada 18 Juli 2012.
- 28 *Diplomasi DPR: Dari Senayan ke Kancan Global*. Jakarta: BKSAP, 2009.
- 29 Poltak Partogi Nainggolan. "Mempertanyakan Urgensi Konferensi IPU di Bali." *Media Indonesia*, 30 April 2007.
- 30 Poltak Partogi Nainggolan. "Parlemen dan Perdagangan Internasional." *Koran Jurnas*, 17 Desember 2012: 6.

- 31 Poltak Partogi Nainggolan. "Studi Banding, Masih Perlukah?" 15 Nopember 2006, *Parlemen. net*, Pusat Informasi Proses Legislasi Indonesia.
- 32 Peter Carey dan G. Carter Bentley, *East Timor at the Crossroads: the Forging of A Nation*. New York: Social Science Research Council, 1995.
- 33 Case No. IDS/10, Sri Bintang Pamungkas, IPU Secretariat, *Results of 95th Conference and Related Meetings*, Istanbul, Turkey, 12-20 April 1996, Annex XXXV.
- 34 Poltak Partogi Nainggolan. "Asian Parliamentary Assembly dan Koalisi Anti-AS." *Jurnal Nasional*, 17 Desember 2008.
- 35 "Komisi I DPR Tembus Jalur Gaza." *Media Indonesia*, 30 Juni 2010, http://gresnews.com/ch/TopStories/cl/Palestina/id/1273741/Komisi+I+DPR_TembusJalur+Ga-za, diakses pada 20 Juli 2012.
- 36 "Parlemen Indonesia Pertama ke Palestina Pasca Putusan PBB." *Berita Satu.com*, 3 Desember 2012, diakses pada 5 Desember 2012.
- 37 "Besok Komisi I DPR Masuk Gaza." *Hidayatullah.com*, 4 Desember 2012.
- 38 Ahmad Toriq. "Ini Curhat Warga Rohingya pada Hidayat Nur Wahid." *Detik.news*, diakses pada 4 Desember 2012.
- 39 "DPR Minta Myanmar Jadikan Muslim Rohingya Warga Negara." *Tribunnews.com*, 2 Agustus 2012, diakses pada 4 Desember 2012.
- 40 Poltak Partogi Nainggolan. "45 Tahun ASEAN, 35 Tahun AIPA dan Lemahnya Sentralitas Kepemimpinan," Poltak Partogi Nainggolan et al, *AIPA dan Realisasi Komunitas ASEAN 2015*, Jakarta: BKSAP, 2013.

- ⁴¹ Poltak Partogi Nainggolan et al. *TKI dan Hubungan Indonesia dan Malaysia*. Jakarta, Pusat Pengkajian dan Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR, 2005.
- ⁴² "RI-Malaysia Sepakat merujuk UNCLOS." *Republika online*, 10 Maret 2010. Omdir.com, <http://osdir.com/ml/culture.region.indonesia>, diakses pada 20 Desember 2012.
- ⁴³ Poltak Partogi Nainggolan et al. *Konflik-konflik Regional Pasca-Perang Dingin*. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR, 2004.
- ⁴⁴ Poltak Partogi Nainggolan et al. *AIPA dan Realisasi Komunitas ASEAN 2015*. Jakarta: BKSAP, 2013.
- ⁴⁵ Poltak Partogi Nainggolan et al. *Respons IPU Terhadap Masalah-masalah Global Pasca-Perang Dingin*. Jakarta: P3I Sekretariat Jenderal DPRRI, 2000.
- ⁴⁶ Poltak Partogi Nainggolan. "DPR's Supporting System and Indonesia's Democratic Consolidation," makalah dipresentasikan dalam *The Second International Seminar for Parliamentary Research Services in Asia*. National Assembly Research Service (NARS), Seoul, South Korea, 2011.
- ⁴⁷ Harold Nicholson. *Diplomacy*. Oxford, 1969.
- ⁴⁸ Poltak Partogi Nainggolan. "Tantangan Menuju Komunitas ASEAN 2015." *Analisis*, CSIS, Vol. 41, No. 3, September 2012.
- ⁴⁹ Riris Katharina dan Poltak Partogi Nainggolan. "Tentang Staf Ahli dan Staf Pribadi di DPR." *Sinar Harapan*, 17 Juni 2005.
- ⁵⁰ Poltak Partogi Nainggolan et al. *Politik Luar Negeri Indonesia Masa Abdurrahman Wahid*. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jenderal DPR, 2001.
- ⁵¹ Poltak Partogi Nainggolan "Parlemen ASEAN, Mungkinkah Terwujud?" *Sinar Harapan*, 25 Agustus 2007.

- ⁵² Poltak Partogi Nainggolan. "Jalan Panjang Menuju Parlemen ASEAN." *Sinar Harapan*, 6 Agustus 2005.
- ⁵³ Poltak Partogi Nainggolan and Riris Katharina. *Strengthening the Management of the Parliamentary Party Groups in the House of Representatives of the Republic of Indonesia*. Jakarta: UNDP, 2008.
- ⁵⁴ Poltak Partogi Nainggolan. "Parlemen Indonesia dalam Lintasan Sejarah," *Panduan Parlemen Indonesia*, Jakarta: API Foundation, 2001.
- ⁵⁵ Poltak Partogi Nainggolan. "Parlemen dan Isu Jender." *Jurnal Kajian*, Vol. 12, No. 1, March 2007, Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi DPR-RI.
- ⁵⁶ Poltak Partogi Nainggolan. "DPD ke Fora Internasional." *Koran Tempo*, Juni 10, 2005.
- ⁵⁷ Eka Saputra. "Calon Presiden IPU Indonesia: Didukung Negara Lain, Ditolak Negara Sendiri." *Kontan Online*, 31 Oktober 2011, <http://www.nasional.kontan.co.id/news/calon-presiden-ipu-indonesia-didukung-negara-lain-ditolak-negara-sendiri>, diakses pada 25 Juli 2013.

DAFTAR KARYA TULIS ILMIAH

1. Poltak Partogi Nainggolan, "Golkar dalam Perkembangan Politik Masa Kini," *Jurnal Ilmu dan Budaya*, No. 4, Januari 1985.
2. "Reformasi Struktur Ekonomi RRC Pasca 1978: Suatu Kasus Pemikiran," *Jurnal Ilmu dan Budaya*, No. 12, September 1985.
3. Poltak Partogi Nainggolan et al, "Golkar dan Sistem Pengkaderan Stelsel Aktif," Hasil Penelitian Kelompok FIS-UI, 1985, *Jurnal Ilmu dan Budaya*, 1986, Tahun IX;
4. "Prancis dan Masyarakatnya: Dua Abad Setelah Prahara Bastille," *Sarinah*, 28 Agustus 1989.
5. "Memahami Parsons melalui Fase-fase," *Jurnal Ilmu dan Budaya*, No. 10, Juli 1991.
6. Poltak Partogi Nainggolan, "Pandangan Subyektif tentang Amerika," Resensi Buku, *Americans: The View from Abroad*, James C. Simmons, 1991 NY: Harmony Books (xii + 240), *Jurnal Ilmu dan Budaya*, No1, Oktober 1992, Tahun XV;
7. Poltak Partogi Nainggolan, "Refleksi Kritis Seorang Pejuang Orde Baru," Resensi Buku, *Titik Pandang untuk Orde Baru*, Albert Hasibuan, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996 (vii +372), *Jurnal Era Hukum*, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Universitas Tarumanegara*, Jakarta, No. 12/Tahun 3/April 1991: 123-126;
8. Poltak Partogi Nainggolan, "Keterlibatan Prancis dalam Konflik Etnis di Rwanda," *Jurnail Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, Jakarta: Universitas 17 Agustus 1945, No. 3/September 1995: 84-96;

9. Poltak Partogi Nainggolan, "Solusi Diplomatik Bosnia: Sebuah Analisis Komparatif," *Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik*, No.3, Tahun 1, Desember 1996, Jakarta: IISIP, 1996: 71-79;
10. Poltak Partogi Nainggolan, "Proses Legislasi Sistem Parlementer dan Presidensial (Kasus Selandia Baru dan Filipina)," *Jurnal Era Hukum, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Universitas Tarumanegara*, Jakarta, No. 8/Tahun 2/April 1996: 50-64;
11. Poltak Partogi Nainggolan, "Towards New Dimension of Parliamentary Libraries Cooperation in Asia-Pasific," *Jurnal Kajian*, Vol. 2, No. 4, 1997: 67-80;
12. Poltak Partogi Nainggolan, "Gerakan Rasisme dan Antisipasi Perkembangan Eropa," *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, Jakarta: Universitas 17 Agustus 1945, No. 7/ Januari-Maret 1997: 87-97;
13. Poltak Partogi Nainggolan, "Kebijakan Republik Indonesia dalam Menghadapi Konflik Bosnia-Herzegovina," *Majalah Ilmiah Hipotesa*, No. 13/Tahun IV/1997, Jakarta: Universitas Jayabaya, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 1997: 18-30;
14. Poltak Partogi Nainggolan, "Critical Analysis of Models of Parliamentary Supporting System: Cases in Advanced and Less-Democratic States," *Jurnal Kajian*, Vol. 2, No. 8, 1997: 51-66;.
15. Poltak Partogi Nainggolan, "Tinjauan Yuridis terhadap RUU Ketenaganukliran," *Majalah Hukum Trisakti*, No. 25/Th.XXII/ Juni 1997, Jakarta: FH Universitas Trisakti, 1997: 33-43;
16. Poltak Partogi Nainggolan, "Clausewitz and Contemporary International Security," *Jurnal Kajian*, Vol. 4, No. 2, July 1999, Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi DPRRI: 129-141;

17. Poltak Partogi Nainggolan, "Containment Policy in the Post-Cold War: Its Existence and Relevance to the Issues of International Security," *Jurnal Atma Nan Jaya*, Universitas Atmajaya, Tahun XIII No. 1, April 2000: 104-127;
18. Poltak Partogi Nainggolan, "Intervensi Kemanusiaan untuk Merespons Konflik Pasca Perang Dingin," *Analisis*, CSIS, Tahun XXIX/2000, No. 2: 154-174;
19. Poltak Partogi Nainggolan, "Humanitarian Intervention in Response to the Post-Cold War Conflicts," *Jurnal Atma Nan Jaya*, Universitas Atmajaya, Tahun XIV, No. 4, December 2001: 82-113;
20. Poltak Partogi Nainggolan, "US Changing Policy on East Timor", *Journal of American Studies*, Vol. 7, No. 1, January-June 2001: 70-111;
21. Poltak Partogi Nainggolan, "Bantuan Luar Negeri dan Kondisionalitas," *Jurnal Kajian*, Vol. 5, No. 2001, Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi DPR-RI;
22. Poltak Partogi Nainggolan, "Terorisme dan Perspektif Keamanan Pasca Perang Dingin," *Analisis*, CSIS, Tahun XXXI/2002, No. 1: 68-89;
23. Poltak Partogi Nainggolan, "Penanganan Terorisme Internasional Dianalisis dari Kajian Teori-teori Hubungan Internasional," *Jurnal Kajian*, Vol. 7, No.4, Desember 2002, Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi DPR-RI: 263-287;
24. Poltak Partogi Nainggolan, "Respons Indonesia atas Terorisme Internasional: Saran-saran Bagi Penyusunan RUU Anti-Terrorisme." *Parlementaria*, Edisi 41, Tahun XXXIII, 2002, Jakarta: DPR-RI: 18-21;
25. Poltak Partogi Nainggolan, "Soft Issues dan Keamanan Internasional." *Analisis*. CSIS, Tahun XXXII/2003, No. 1: 49-56;

26. Poltak Partogi Nainggolan, "Pandemik SARS sebagai Masalah Keamanan Abad ke-21," *Jurnal Kajian*, Vol. 8, No. 2, Juni 2003, Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi DPR-RI: 1-26;
27. Poltak Partogi Nainggolan, "Lingkungan Sebagai Masalah Keamanan," *Jurnal Kajian*, Vol. 9, No. 2, Juni 2004, Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi DPR-RI: 51-83;
28. Poltak Partogi Nainggolan, *Books Review: "The Danger of Despotism, the Tyranny of Majority, and 'New' Challenges for Representatives Government: In Search of the Relevance of Mill's and Tocqueville's Work on Democracy"*, *Jurnal Kajian* Vol. 9, No. 1, March 2004, Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi DPR-RI: 87-92;
29. Poltak Partogi Nainggolan, *Book Review: "The Relevance of Huntington's Works on the Clash of Civilizations"*, *Jurnal Kajian*, Vol. 10, No. 1, June 2005, Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi DPR-RI: 81-85;
30. Poltak Partogi Nainggolan, "*The Indonesian Military and the 2004 Election*". *Jentera*, PSHK, 11th Edition, 3rd Year, January-March 2006: 85-111;
31. Poltak Partogi Nainggolan, "*Globalization and International Political-Economy*," *Jurnal Kajian*, Vol. 11, No. 2, Juni 2006, Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi DPR-RI: 51-70;
32. Poltak Partogi Nainggolan, "*UN Military Operations in the Post-Cold War Period*," *Jurnal Kajian*, Vol. 11, No. 3, September 2006, Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi DPR-RI: 51-72;
33. Poltak Partogi Nainggolan, "*Questioning the Role of NGOs and Donor Countries*". *Jentera*, PSHK, 13th Edition, 3rd Year, July-September 2006: 7-21;

34. Poltak Partogi Nainggolan, "Globalisasi dan Ekonomi Politik Internasional", *Jurnal Kajian*, Vol. 11, No. 2, June 2006, Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi DPR-RI: 51-70;
35. Poltak Partogi Nainggolan, "Parlemen dan Isu Jender," *Jurnal Kajian*, Vol. 12, No. 1, March 2007, Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi DPR-RI: 79-95;
36. Poltak Partogi Nainggolan, Review Buku: *Habibie: Detik-detik yang Menentukan*, Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi (Jakarta: THC Mandiri, 2006), "Antara Fakta Sejarah dan Pembetulan". *Jurnal Kajian*, Vol. 12, No. 1, March 2007, Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi DPR-RI: 97-100;
37. Poltak Partogi Nainggolan, "Menuju Pembentukan Parlemen ASEAN," *Analisis*, CSIS, Vol. 36, No. 4/Desember 2007: 440-453;
38. Poltak Partogi Nainggolan, "Masalah Perbatasan Indonesia-Timor Leste: Perspektif Keamanan". *Jurnal Kajian*, Vol. 12, No. 4, December 2007, Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi DPRRI: 431-458;
39. Poltak Partogi Nainggolan, "Masalah Perbatasan Indonesia-Papua Nugini: Perspektif Keamanan". *Jurnal Kajian*, Vol. 13, No. 4, December 2008, Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi DPRRI: 593-617;
40. Poltak Partogi Nainggolan, "An ASEAN Parliament in the Region?" *paper presented for discussions in the Association of Southeast Asia Students of the Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg, the Arnold-Bergstraesser Institut (ABI), Freiburg, 2009, unpublished;*

41. Poltak Partogi Nainggolan, "Imigran Gelap di Indonesia: Masalah dan Penanganan" *Jurnal Kajian*, Vol. 15, No. 1, March 2010, Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi DPRRI: 111-139;
42. Poltak Partogi Nainggolan, "Degradasi Lingkungan dan Pemanasan dan Perubahan Iklim Global, dan Relevansinya dengan Masalah Keamanan," *Jurnal Kajian*, Vol. 16, No. 1, March 2011, Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi DPRRI: 29-51;
43. Poltak Partogi Nainggolan, "Four Thesis on ASEAN," paper presented for discussions in Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg, 2011, unpublished;
44. Poltak Partogi Nainggolan, "Peran DPR dalam Menjalankan Kontrol Demokratis atas Pembaruan Sektor Keamanan," *Jurnal Politica*, Vol 2, No. 1, Mei 2011: 1-44;
45. Poltak Partogi Nainggolan, "Masalah Keamanan dan Penyelundupan Senjata ke Wilayah Indonesia," *Analisis*, CSIS, Vol. 40, No. 3, September 2011: 445-479;
46. Poltak Partogi Nainggolan, "Ancaman Keamanan Non-Konvensional di Pulau Terluar Indonesia: Kasus Kepulauan Morotai," *Jurnal Politica*, Vol 2, No. 2, Nopember 2011: 221-247;
47. Poltak Partogi Nainggolan, "Keamanan Sosial dan Keamanan Lingkungan di Pulau Terluar Indonesia: Kasus Kepulauan Raja Ampat," *Jurnal Politica*, Vol 3, No. 1, Mei 2012: 87-109;
48. Poltak Partogi Nainggolan, "The Plenary, the Role of Speaker, and Supporting System In Indonesia's DPR," makalah presentasi di untuk *National Assembly Research Service (NARS)*, Korea Selatan, Juni 2012;

49. Poltak Partogi Nainggolan, "Assessing the Current Progress of Indonesia's Security Sector Reform," makalah untuk Seminar "Strengthening Security Sector Reform in Asia," diadakan oleh Friedrich Naumann Stiftung (FNS), Oktober 2012, Manila, the Philippines, unpublished;
50. Poltak Partogi Nainggolan, "Parlemen dan Milenium Baru," *Parlementaria*, Th XLII, 2012: 32-35;
51. Poltak Partogi Nainggolan, "45 Tahun ASEAN dan Sentralitas ASEAN," *Kajian Singkat*, 6 September 2012, 16/11/P3DI/Agustus/201245;
52. Poltak Partogi Nainggolan, "Tantangan Menuju Komunitas ASEAN 2015," *Analisis*, CSIS, Vol. 41, No. 3, September 2012: 352-379;
53. Poltak Partogi Nainggolan, "Mengapa Konflik Muncul Kembali di Kota Ambon? Sebuah Pendekatan Demografi-Kepentingan atas Konflik Perkotaan," *Jurnal Politica*, Vol 3, No. 2, Nopember 2012: 87-109;
54. Poltak Partogi Nainggolan, "KTT ASEAN Ke-21 dan Komunitas ASEAN 2015," *Kajian Singkat*, 6 Desember 2012, 16/11/P3DI/Desember/201245;
55. Poltak Partogi Nainggolan, "Politik Luar Negeri Indonesia 2013 dan Relevansinya dengan Peran Parlemen," *Kajian Singkat*, 14 Januari 2013;
56. Poltak Partogi Nainggolan, "Kepentingan AS atas Laut Cina Selatan" *Jurnal Politica*, Vol 4, No. 1, Juli 2013: 87-109;
57. Poltak Partogi Nainggolan, *Reformasi RRC Era-Deng Xiaoping*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995 (vi + 232);
58. Poltak Partogi Nainggolan et al, *ASEAN, AIPO, dan Kawasan yang Berubah*. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jenderal DPR-RI, 1997 (v + 166);

59. Poltak Partogi Nainggolan, *Kinerja DPR dalam Inter-Parliamentary Union (IPU)*. Badan Kerjasama Antar-Parlemen DPR-RI, Oktober 2000 (5 + 78);
60. Poltak Partogi Nainggolan et al, *Penelitian Parlemen 1998-2000*. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jenderal DPR-RI, 2000 (xiv + 206);
61. Poltak Partogi Nainggolan et al, *Panduan Parlemen Indonesia*, Jakarta: API Foundation, 2001;
62. Poltak Partogi Nainggolan et al, *Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas Batam*. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jenderal DPR-RI, 2001 (vii + 208);
63. Poltak Partogi Nainggolan et al, *Politik Luar Negeri Indonesia Masa Abdurrachman Wahid*. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jenderal DPR-RI, 2001 (x + 320);
64. Poltak Partogi Nainggolan et al, *Terorisme Internasional dan Tata Dunia Baru*. Jakarta: Tiga Utama, 2002 (xv + 191);
65. Poltak Partogi Nainggolan et al, *Twenty Five Years ASEAN Inter-Parliamentary Organization*. Jakarta: AIPO Secretariat General, 2003 (Vol. I and II, xxii + 137 and v + 200);
66. Poltak Partogi Nainggolan et al, *Masalah-masalah Perbatasan Indonesia*. Jakarta: Tiga Utama, 2004 (x + 238);
67. (Poltak Partogi Nainggolan et al, *Konflik-konflik Regional Pasca-Perang Dingin*. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR-RI, 2004 (xvi + 280);
68. Poltak Partogi Nainggolan et al, *TKI dan Hubungan Indonesia dan Malaysia*. Jakarta, Pusat Pengkajian dan Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR-RI, 2005: 95-155;

69. Poltak Partogi Nainggolan et al, *Komando Teritorial dan Budaya Politik TNI di Era Reformasi*. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR-RI, 2007 (ii + 223);
70. Poltak Partogi Nainggolan dan Riris Katharina, *Strengthening the Management of the Parliamentary Party Groups in the House of Representatives of the Republic of Indonesia*. Jakarta: UNDP, 2008 (151 hal);
71. Poltak Partogi Nainggolan, "Indonesian Democratic Transition and the Handling of Human Rights Issues," makalah untuk ASEAN Inter-Parliamentary Assembly Meeting on Human Rights, Phnom Penh, Kamboja, 2008 (unpublished);
72. Poltak Partogi Nainggolan et al, *Masalah Perbatasan Indonesia-Timor Leste*. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR-RI, 2008 (iii + 157);
73. Poltak Partogi Nainggolan et al, "Menciptakan DPR dan Sistem Pendukung Parlemen yang Mendukung Anggaran Pro-Kaum Miskin," *Anggaran Pro-Kaum Miskin: Sebuah Upaya Menyejahterakan Kaum Miskin*, Jakarta: LP3ES-Prakarsa, 2009 (xxvi + 339);
74. Poltak Partogi Nainggolan et al, *Masalah Perbatasan Indonesia-Papua Nugini*. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR-RI, 2009 (iv + 226);
75. Poltak Partogi Nainggolan et al, *Masalah Imigran Gelap di Indonesia*. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR-RI, 2009 (x + 252);
76. Poltak Partogi Nainggolan et al, *Pemanasan Global dan Perubahan Iklim*. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR-RI, 2010 (xii + 311);

77. Poltak Partogi Nainggolan et al, *Masalah Negara Kepulauan di Era Globalisasi*. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR-RI, 2011 (xi + 205);
78. Poltak Partogi Nainggolan et al, *Inter-Parliamentary Union dan Agenda Global Abad 21*, Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR-RI, 2011 (xi + 187);
79. Poltak Partogi Nainggolan et al, *The Second International Seminar for Parliamentary Research Services in Asia*, National Assembly Research Service (NARS), Seoul, South Korea, 2011: 43-61 (v + 193);
80. Poltak Partogi Nainggolan et al, *The Third International Seminar for Parliamentary Research Services in Asia*, National Assembly Research Service (NARS), Seoul, South Korea, 2012: 125-142 (vi + 255);
81. Poltak Partogi Nainggolan et al, *Masalah Pulau-Pulau Perbatasan dan Terluar: Kabupaten Kepulauan Morotai dan Kabupaten Kepulauan Raja Ampat*. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR-RI, 2012 (xi + 231);
82. Poltak Partogi Nainggolan et al, *Masalah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil*, Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR-RI, 2012 (xi + 217);
83. Poltak Partogi Nainggolan, *The Indonesian Military Response to Reform: A Comparative Analysis to Three Civilian Regimes (1998-2004)*. Jakarta: Pustaka Azzam 2012 (xviii + 396).
84. Poltak Partogi Nainggolan et al, *Diplomasi Parlemen di Asia Tenggara: Spektrum Kepemimpinan Indonesia di ASEAN Inter-Parliamentary Assembly 2011-2012*. Jakarta: The House of Representatives of the Republic of Indonesia, 2012 (iii + 95);

85. Poltak Partogi Nainggolan et al, *AIPA dan Realisasi Komunitas ASEAN 2015*, Jakarta, BKSAP, 2013 (xxiii + 278).

Sejak 1984 hingga saat ini menulis di surat kabar nasional dan media elektronik tentang isu-isu domestik dan internasional, antara lain:

1. Poltak Partogi Nainggolan, "Koreksi RUU Kamnas," *Koran Republika*, April 2013.
2. Poltak Partogi Nainggolan, "Keselamatan Ekologis dan Keamanan Manusia," *Sinar Harapan*, 8 Januari 2013;
3. Poltak Partogi Nainggolan, "Parlemen dan Perdagangan Bebas," *Koran Jurnal Nasional (Jurnas)*, 17 Desember 2012;
4. Poltak Partogi Nainggolan, "RUU Ormas dan Konsolidasi Demokratis," *Suara Pembaruan*, 29 Maret 2012;
5. Poltak Partogi Nainggolan, "Dapatkah RUU Pemilu Capai Sasarannya," *Suara Pembaruan*, 24 Pebruari 2012;
6. Poltak Partogi Nainggolan, "Manuver Militer AS di Asia-Pasifik," *Koran Jurnal Nasional (Jurnas)*, 9 Maret 2012; DLL.
7. Poltak Partogi Nainggolan, "Perlunya Mengamendemen UU Keparlemenan," *Suara Pembaruan*, 14 September 2011; DLL.
8. Poltak Partogi Nainggolan, "Patologi Birokrasi DPR," *Media Indonesia*, 28 Januari 2008.
9. Poltak Partogi Nainggolan, "Asian Parliamentary Assembly dan Koalisi Anti-AS," *Suara Karya*, 30 Desember 2008. DLL.
10. Poltak Partogi Nainggolan, "Matinya Hati Nurani (Wakil) Rakyat," *Media Indonesia*, 13 September 2007;

11. Poltak Partogi Nainggolan, "Parlemen ASEAN, Mungkinkah Terwujud," *Sinar Harapan*, 25 Agustus 2007;
12. Poltak Partogi Nainggolan, "Mempertanyakan Urgensi Sidang Umum *Inter-Parliamentary Union* (IPU) di Bali," *Media Indonesia*, 30 April 2007; DLL.
13. Poltak Partogi Nainggolan dan Riris Katharina, "Ruang Partisipasi Publik di DPR," *Sinar Harapan*, 2 Agustus 2006.
14. Poltak Partogi Nainggolan, "Tantangan Koalisi Hitam-Merah di Jerman" *Seputar Indonesia*, 13 April 2006.
15. Poltak Partogi Nainggolan, "Studi Banding DPR, Masih Perlukah?" *Parlemen.net*, 16 Nopember 2006.
16. Poltak Partogi Nainggolan, "Jalan Panjang Menuju Parlemen ASEAN," *Sinar Harapan*, 2006. DLL.
17. Poltak Partogi Nainggolan, "Rasionalkah Keinginan DPR Menaikkan Gaji?" *Parlemen.net*, 22 Maret 2005.
18. Poltak Partogi Nainggolan, "Konflik Konstitusional DPD dan DPR," *Bisnis Indonesia*, 7 September 2005.
19. Poltak Partogi Nainggolan, "RUU Kebebasan Informasi, Apa Kabar?" *Koran Tempo*, 29 Juni 2005.
20. Riris Katharina dan Poltak Partogi Nainggolan dan "Tentang Staf Ahli dan Staf Pribadi di DPR," *Sinar Harapan*, 17 Juni 2005.
21. Poltak Partogi Nainggolan, "DPD ke Fora Internasional," *Koran Tempo*, 10 Juni 2005.
22. Poltak Partogi Nainggolan, "Sipil dan Transisi Demokratis di Indonesia," *Koran Tempo*, 11 Mei 2005.

23. Poltak Partogi Nainggolan, "DPR dan 'Take Home Pay,'" *Media Indonesia*, 26 Oktober 2005.
DLL.
24. Poltak Partogi Nainggolan, "European Community, Ancaman bagi Rusia," *Reporter*, 4 Mei 2004.
DLL.
25. Poltak Partogi Nainggolan, "Makna Paket Reformasi IMF bagi Kita," *Neraca*, 19 Januari 1998.
26. Poltak Partogi Nainggolan, "Politik Luar Negeri AS dan Krisis Moneter Asia Timur," *Neraca*, 5 Pebruari 1998.
27. Poltak Partogi Nainggolan, "Pilar-pilar Demokrasi Jerman," *Parlementaria*, No. 21, XXIX, 1998.
DLL.
28. Poltak Partogi Nainggolan, "Kesiapan Indonesia dalam ASEAN Free Trade Area," *Pelita*, 2-3 Januari 1997.
29. Poltak Partogi Nainggolan, "Staf Ahli dan Kinerja Internasional DPR," *Jayakarta*, 2 April 1997.
30. Poltak Partogi Nainggolan, "Menarik Pelajaran dari Bundestag," *Neraca*, 6 Juni 1997.
31. Poltak Partogi Nainggolan, "Menyambut Sidang Umum AIPOXVIII di Bali," 2-3 September 1997.
32. Poltak Partogi Nainggolan, "ASEAN dan Dwidarsa AIPO," *Neraca*, 20 September 1997.
DLL.
33. Poltak Partogi Nainggolan, "Anggota Parlemen dan Kebijakan Nuklir," *Pelita*, 16 April 1996.
34. Poltak Partogi Nainggolan, "Pentingnya Kehadiran Tenaga Ahli di DPR," *Media Indonesia*, 18 Juli 1996.

35. Poltak Partogi Nainggolan, "Dari *The Second International Forum of WTO on Parliaments and Local Authorities*," *Majalah Parlementaria*, No. 17, XXVIII, 1996.
DLL.
36. Poltak Partogi Nainggolan, "Konstelasi Politik Prancis Pasca-Pemilu," *Media Indonesia*, 23 Mei 1995.
37. Poltak Partogi Nainggolan, "Recall Anggota Parlemen di Berbagai Negara," *Merdeka*, 29 Maret 1995.
38. Poltak Partogi Nainggolan, "DPR dan Staf Pendukung," *Surabaya Post*, 10 Maret 1995.
39. Poltak Partogi Nainggolan, "Kontroversi Uji Coba Nuklir Prancis," *Suara Pembaruan*, 5 Juli 1995.
40. Poltak Partogi Nainggolan, "Harmonisasi Hubungan RRC-AS," *Merdeka*, 4 Februari 1995.
DLL.
41. Poltak Partogi Nainggolan, "Kecenderungan Perkembangan Global dan ASEAN Inter-Parliamentary Organization," *Merdeka*, 20 September 1994.
42. Poltak Partogi Nainggolan, "Parlemen Eropa, Pemilu Juni 1994, dan Implikasinya," *Pelita*, 25 Juli 1994.
43. Poltak Partogi Nainggolan, "Konflik Dunia Pasca-Perang Dingin," *Jakarta*, April 26, 1994.
44. Poltak Partogi Nainggolan, "Parlemen Jerman: Antara Formalitas dan Kinerja," *Merdeka*, 1-2 September 1994.
DLL.
45. Poltak Partogi Nainggolan, "Peran Parlemen Indonesia dalam Ratifikasi Perjanjian Internasional," *Neraca*, 22 Juni 1993.
46. Poltak Partogi Nainggolan, "Antara Diplomasi Kohl dan Mitterand," *Neraca*, 3 April 1993.

47. Poltak Partogi Nainggolan, "Diplomasi Ekonomi Ofensif Prancis di Indonesia," *Jayakarta*, 30 Januari 1993.
DLL.
48. Poltak Partogi Nainggolan, "Bush-Gorbachev dan Arsenal Nuklir." *Neraca*, 8 Agustus 1992.
49. Poltak Partogi Nainggolan, "Perkembangan Reformasi Ekonomi Viet Nam," *Bisnis Indonesia*, 12 Oktober 1992.
50. Poltak Partogi Nainggolan, "Bangkitnya Rasialisme di Eropa," *Suara Karya*, 19 Oktober 1992.
DLL.
51. Poltak Partogi Nainggolan, "Otoriterisme dan Demokrasi." *Merdeka*, Oktober 1991.
52. Poltak Partogi Nainggolan, "Demokrasi, Penegakan Hukum dan Kontrol Kekuasaan di Indonesia." *Merdeka*, 11 Oktober 1991.
53. Poltak Partogi Nainggolan, "Kontroversi di Sekitar *International Conference on Kampuchea*," *Suara Pembaruan*, 31 Juli 1991.
DLL.

DAFTAR KEGIATAN ILMIAH SEBAGAI PEMBICARA

1. Pembicara dalam konferensi "*Le Role et Function de l'Union Inter-Parlementaire et les groupes nationaux*," diadakan oleh IPU Headquarter, Geneve, Suisse, November 1993;
2. Pembicara dalam "*Comparative Legislature Seminar*" di Filipina dan Selandia Baru, diadakan oleh the Asia Foundation, Oktober 1994;
3. Pembicara dalam "*The Role of Research Center in Supporting Legislation at the Indonesian Parliament*," diadakan oleh National Democratic Institute (NDI), Jakarta 2000;
4. Pembicara dalam, "Responsible Parliamentary Government for parliamentary officials from the new emerging democracies," Australian National University (ANU) and Centre for Democratic Institution (CDI), November 2003;
5. Pembicara dalam "*The Indonesian House of Representative and the Role of Its Research Services*," United Nations Support Facility for Indonesian Recovery (UNSFIR), 2004;
6. Pembicara dalam presentasi "*Parliament, Military, and Political Reform in Indonesia*," di United States-Indonesian Society (USINDO), Washington DC, Februari (15) 2005;
7. Pembicara dalam diskusi panel "Peningkatan Peran Legislasi DPR," PSHK, 2005
8. Pembicara dalam lokakarya "*Understanding Social Conflicts and Conflict Resolutions*," di Khong Kaen dan Bangkok, Thailand, diadakan oleh LSM Canada, Chulalongkorn University, dan King Prajadiphok Research Institute, 2006;
9. Pembicara dalam lokakarya "Pemetaan dan Perbaikan Kinerja Anggota DPR," LSPP, 2006;

10. Pembicara dalam seminar *"The Future of an ASEAN Parliament Proposal,"* di Arnold-Bergstraesser Institut, Freiburg, Jerman, July (29) 2007;
11. Pembicara dalam FGD "Tentang Kinerja dan Etika Anggota DPR," PSHK, 2007;
12. Pembicara dalam FGD "Sistem Pendukung DPR dan UU MD3," PSHK, 2008;
13. Narasumber dalam Program Produksi Film Legislasi dan Dampaknya bagi Rakyat, PSHK, 2008;
14. Pembicara dalam lokakarya "The Development of Research Services in Parliaments," diadakan oleh IRI, di Library of Congress, Washington DC, Desember 2009;
15. Pembicara dalam lokakarya "UUD MD3 dan Konsekuensinya atas DPRD," DPRD Padang Panjang, 2009;
16. Pembicara dalam lokakarya "UUD MD3 dan Konsekuensinya atas Tatib dan Kode Etik DPRD," DPRD Subang, 2009
17. Pembicara dalam lokakarya "Peran Peneliti dalam Menyediakan Pelayanan Riset di Parlemen," DPR, Jakarta, 22 Februari 2010;
18. Pembicara dalam lokakarya *"International Organization and International Security"* dalam *Regional Forum for Young Politicians*, 26 Nopember 2010, Bandung;
19. Pembicara dalam FGD "Memperbaiki Kinerja DPR dan Sistem Pendukung Parlemen," PSHK Jakarta, 19 Agustus 2011;
20. Pembicara dalam lokakarya "Pelayanan Keahlian dan Memenuhi Kebutuhan Anggota Parlemen atas Informasi, *National Democratic Institute* (NDI) Jakarta, 29 November 2011;
21. Pembicara dalam lokakarya "Mengelola Sistem Pendukung Parlemen," *Australia-Indonesia Partnership for Development* (AIPD), Lombok, 2 Desember 2011;

22. Pembicara dalam lokakarya "Parlemen dan Akuntabilitas Anggaran," *Australia-Indonesia Partnership for Development (AIPD)*, Lombok, 22 Desember 2011;
23. Pembicara dalam lokakarya "Parlemen dan Penyusunan Anggaran yang Mendukung Peningkatan Kinerja Parlemen," Adkasi, Bandung, 24 Desember 2011;
24. Pembicara dalam "Parlemen dan Anggaran Pro-Rakyat," DPRD Bima, 2011;
25. Pembicara dalam "Parlemen dan Tata Kelola Anggaran yang Baik," DPRD Dompu, 2011;
26. Pembicara dalam "*The Second International Seminar for Parliamentary Research Services in Asia*," diadakan oleh *National Assembly Research Service (NARS)*, Seoul, South Korea, Nopember 2011;
27. Pembicara dalam "*The Third International Seminar for Parliamentary Research Services in Asia*," diadakan oleh *National Assembly Research Service (NARS)*, Seoul, South Korea, Juni 2012;
28. Pembicara dalam *Workshop of the 10th International Parliamentary Forum (IPF)-Security Sector Governance (SSG), "Towards an ASEAN Political-Security Community: What Role for Parliaments?"* diadakan oleh *Friedrich Ebert-Stiftung* dan *Geneve Center for Democratic Control of Armed Forces (DCAF)*, Oktober 2012, Manila, the Philipppines;
29. Pembicara untuk Pelatihan *Legal Drafting* Tingkat Lanjutan untuk Tenaga Ahli Fraksi DPRRI, *National Democratic Institute (NDI)* bekerjasama dengan *Indonesian Parliamentary Center (IPC)*, Hotel Atlet Century Senayan, 25 Januari 2012.
30. Pembicara dalam lokakarya "Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR," The Habibie Center, 13 Maret 2012.

31. Pembicara dalam lokakarya "Parlemen, Kode Etik, Akuntabilitas dan *Good Governance*," Pusat Pengkajian Keparlemenan, Grand Cempaka, 16 Maret 2012.
32. Pembicara dalam lokakarya "Perbaikan Sistem Penganggaran DPRD," Adeksi, Bandung, 10 Oktober 2012;
33. Pembicara dalam lokakarya "Penguatan Sistem Presidensial," *Indonesian Parliamentary Center (IPC)*, Jakarta, 19 Oktober 2012;
34. Pembicara dalam lokakarya "Pengukuran Kinerja dan Akuntabilitas Anggota DPR," Formappi, Jakarta, 2012;
35. Pembicara dalam diskusi "Politik Lokal dan Otonomi Daerah," Universitas Lampung (Unila), 23 Mei 2013;
36. Pembicara dalam diskusi "*ASEAN Political-Security Community*," DPR-RI, 5 Maret 2013;
37. Pembicara dalam "*Workshop of the 11th International Parliamentary Forum (IPF)-Security Sector Governance (SSG), 'Security Sector Reform and Democratization in Southeast Asia: What Role for Parliaments?'*" diadakan oleh Friedrich Ebert-Stiftung dan DCAF. 15-16 Juni 2013, Bangkok, Thailand;
38. Pembicara dalam *Workshop on Striving for Best Practices from ASEAN Policy and ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) Resolutions into National Law*, diadakan oleh *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)*, *Deutsche Gesellschaft fuer International Zusammenarbeit (GIZ)*, dan *Hanss Seidel Stiftung (HSS)*, 17-19 Juni 2013, Jakarta.

EDITOR MAJALAH

Redaksi Pelaksana Jurnal *Kajian*, 1998-2000;

Redaksi Ahli Jurnal *Kajian* 2000-2004;

Ketua Dewan Redaksi Jurnal *Kajian* 2005-2009;

Ketua Dewan Redaksi dan Penanggung Jawab Jurnal *Kajian* 2009-sekarang;

Dewan Redaksi dan Penanggung Jawab Jurnal *Politica* 2010-sekarang.

PEMBINAAN KADER ILMIAH

1. Memberikan Bimbingan tentang Penelitian Laut Cina Selatan, P3DI, DPR-RI, 2013;
2. Memberikan Bimbingan tentang Penelitian Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Indonesia, P3DI, DPR-RI, 2012;
3. Memberikan Bimbingan dan Pelatihan tentang Masalah-Masalah Keparlemenan, *Legal Drafting*, dan *Budget Analysis* untuk DPRD di Lombok, Bima, 2012;
4. Memberikan Bimbingan tentang Penelitian Pulau-Pulau Terluar Indonesia, P3DI, DPR-RI, 2011;
5. Memberikan Bimbingan dan Pelatihan tentang Masalah-Masalah Keparlemenan, *Legal Drafting*, dan *Budget Analysis* untuk AIPD (Australia-Indonesia Project for Decentralisation), 2011;
6. Memberikan Bimbingan dan Pelatihan tentang masalah-masalah keparlemenan, *Legal Drafting*, *Legislative Researches*, dan analisis untuk *Indonesian Parliamentary Center* (IPC), 2010 - Sekarang;
7. Memberikan Bimbingan tentang Penelitian Perubahan Iklim, P3DI, DPR-RI 2010;
8. Memberikan Bimbingan tentang Masalah-Masalah Keparlemenan, *Legal Drafting*, dan *Budget Analysis* di DPRD Jawa Barat, 2010;
9. Memberikan Bimbingan dan Pelatihan tentang masalah-masalah keparlemenan, *Legal Drafting*, *Legislative Researches*, dan analisis untuk Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), 2009 - Sekarang;

10. Memberikan Bimbingan tentang Penelitian Penyelundupan Manusia, 2009;
11. Memberikan Advokasi dan Asistensi tentang Tim Penelitian Universitaet Freiburg Reformasi Sektor Keamanan Indonesia, *Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg* dan *Geneva Centre for the Democratic Control for Armed Forces*, DCAF, Geneve, 2009;
12. Memberikan Bimbingan tentang Penelitian Masalah Perbatasan Indonesia dan PNG, P3DI, DPR-RI, 2008;
13. Memberikan Bimbingan dan Pelatihan tentang Penelitian Manajemen Fraksi di DPR-RI, UNDP, 2008;
14. Memberikan Bimbingan dan Pelatihan tentang Masalah-Masalah Keparlemenan, *Legal Drafting*, dan *Budget Analysis* untuk Advokasi, 2008;
15. Memberikan Bimbingan dan Pelatihan tentang Masalah-Masalah Keparlemenan, *Legal Drafting*, dan *Budget Analysis* di DPRD Bogor, 2008;
16. Memberikan Bimbingan dan Pelatihan tentang masalah-masalah keparlemenan, *Legal Drafting*, *Legislative Researches*, dan analisis untuk Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), 2007 - Sekarang;
17. Memberikan Bimbingan tentang Penelitian Masalah Perbatasan Indonesia dan Timor Leste, P3DI, DPR-RI, 2007;
18. Memberikan Bimbingan dan Pelatihan tentang Masalah-Masalah Keparlemenan, *Legal Drafting*, dan *Budget Analysis* di DPRD Banten, 2007;
19. Memberikan Bimbingan tentang Penelitian Pekerja Migran (TKI) Indonesia di Malaysia, P3DI, DPR-RI, 2006;
20. Memberikan Bimbingan tentang Penelitian Masalah-Masalah Perbatasan, P3DI, DPR-RI, 2005;

21. Memberikan Bimbingan tentang Penelitian Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas Batam, dibiayai IRI/*University of Maryland*, 2003;
22. Memberikan Bimbingan tentang Penelitian Kemiskinan di Jakarta dan Jawa Tengah, P3DI, DPR-RI, 1997.
23. Membimbing Riset untuk Disertasi Mahasiswa Doktoral Univesitaet Hamburg, Universitaet Heidelberg dan Universitaet Freiburg



AKTIFITAS DI ORGANISASI ILMIAH

Perhimpunan Akademisi/Peneliti Asia Tenggara *Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg*, 2010-sekarang;

Asosiasi Peneliti Asia Tenggara *Arnold-Bergstrasse Institut*, 2005-2010;

Anggota Asosiasi Peneliti Parlemen Asia, 2011-sekarang;

Perhimpunan Alumni *Albert-Ludwigs Universitaet Freiburg*, 2011-sekarang;

Perhimpunan Alumni *University of Birmingham*, 2003-sekarang;

Anggota Ikatan Alumni UI (ILUNI UI), 1986-sekarang;

Anggota Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Birmingham (PMIB), 1998-1999;

Pengurus Alumni *Hanns Seidel Stiftung* Jerman (PAHSI) 2006-2011.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP LENGKAP

A. Keterangan Pribadi

Nama Lengkap : Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, MA
Tempat tanggal/ Lahir : Jakarta, 26 Juni 1963
Anak ke : 2 dari 6 bersaudara
Nama Ayah : Sahat M. Nainggolan, SH
Kandung
Nama Ibu : Dorcas Napitupulu
Kandung
Nama Istri : Riris Katharina, S.Sos, M.Si
Tanggal/Tahun Menikah : 19 Desember 2000
Jumlah Anak : 1 (satu), Puteri
Nama Anak : Reynnalda Alisha
Alamat Rumah : Puspa Asri 14, Cirendeu, Pisangan, Tangerang Selatan, Indonesia.
Telp. (62) (21) 7490266; 08161305243
Nama Instansi : Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPRRI
Judul Orasi : Parlemen dan Hubungan Internasional: Diplomasi DPR-RI di Fora Internasional
Bidang Penelitian : Masalah-masalah Hubungan Internasional

Alamat Instansi : Pusat Pengkajian dan Pelayanan Data dan Informasi (P3DI DPR-RI), Nusantara 1, Lt. 2, DPR-RI, Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270, Indonesia. Telp.: (62) (21) 5715 367. Fax: (62) (21) 5715 245

Alamat Email : partogi@dpr.go.id; pptogin@yahoo.com

Nomor SK : Keputusan Presiden RI No. No. 73/K
Pangkat IV/e : Tahun 2011 tertanggal 6 Desember 2011 mengangkat pangkat setingkat lebih tinggi sebagai Peneliti Utama Gol. IV/e dengan pangkat Pembina Utama IV/e terhitung 6 Desember 2011;

Nomor SK : Penetapan Angka Kredit oleh Kepala
Fungsional IV/e : LIPI No. 0215/D/2006 tertanggal 26 September 2006 terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2006.

B. Pendidikan Formal

NO	JENJANG PENDIDIKAN	NAMA SEKOLAH	TEMPAT/KOTA	TAMAT
1	Sekolah Dasar	SD Jend. Sudirman	Jakarta	1974
2	Sekolah Menengah Pertama	SMP Negeri LVIII	Jakarta	1977
3	Sekolah Menengah Atas	SMA Negeri III	Jakarta	1981

4	Strata-1	Departemen Politik dan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu-ilmu Sosial (FIS) Universitas Indonesia	Jakarta	1986
5	Strata-2	<i>Graduate School of Political Science and International Relations of the University of Birmingham</i>	Birmingham, Inggris	1999
6	Strata-3	Seminar für Wissenschaftliche Politik Albert-Ludwigs Universitaet Freiburg	Freiburg, Jerman	2011

C. Pendidikan Non-Formal

NO	JENIS KURSUS	NAMA LEMBAGA	TEMPAT	TAHUN
1.	Bahasa Prancis	<i>Centre Culturel Française (CCF)</i>	Jakarta	1987-1994
2.	Bahasa Jerman	<i>Goethe Institut</i>	Jakarta	1991-1997
3	Bahasa Jerman	<i>Goethe Institut, Boppard, Rheinland-Pfalz</i>	Boppard, Rheinland-Pfalz, Jerman	1993
4	<i>English Academic Course</i>	<i>The University of Birmingham</i>	Birmingham, Inggris	1998-1999

5	<i>English Advance Writing Course</i>	<i>AMINEF Foundation</i>	Jakarta	2003
---	---------------------------------------	--------------------------	---------	------

D. Lokakarya dan Magang Internasional

NO	TOPIK MAGANG/ LOKAKARYA	NAMA LEMBAGA/ SPONSOR	TEMPAT	TAHUN
1.	Sistem Keparlemenan	DPR Negara Bagian Thueringen/ <i>Konrad Adenauer Stiftung</i>	Thueringen, Jerman	1993
2.	Riset tentang Asia dan Pelayanan Riset untuk Parlemen	Dr. Richard Kronin (CRS) dan Dr. Gordon Hein (<i>Asia Foundation</i>)	Jakarta	1993
3.	Pelayanan Riset di Parlemen Jerman (<i>Wissenschaftlicher Dienst</i>)	Dr. Wolfgang Zeh (<i>Bundestag</i>)/ <i>Konrad Adenauer Stiftung (KAS)</i>	Jakarta	1995
4.	Hubungan Internasional dan Keamanan Internasional	NATO dan Uni Eropa/ <i>The University of Birmingham</i>	Brussel, Belgia	1999

5.	Parlemen dan Akuntabilitas	<i>Regional Forum for Parliamentary Accountability/ Centre for Legislative Development (CLD)</i>	Manila, Filipina	2001
6.	<i>Human Security Issues and Policy Options in the 21st Century</i>	<i>Paragon Regional Governance Programme/ National Democratic Institute (NDI)</i>	Manila, Filipina	2001
7.	<i>Responsible Parliamentary Government for parliamentary officials</i>	<i>Australian National University (ANU) dan Centre for Democratic Institution (CDI)</i>	Canberra, Australia	2003
8.	<i>International Leadership</i>	<i>US State Department/ US Congress</i>	Amerika Serikat	2005
9.	Konflik dan Resolusi Konflik di Asia	<i>Chulalongkorn University dan King Prajadiphok Research Institute;</i>	Khong Kaen dan Bangkok, Thailand	2006
10.	Pelayanan Riset di Parlemen	<i>House Democracy Partnership (HDP)/IRI</i>	Washington DC, AS	2009

11.	<i>Parliament and ASEAN Political-Security Community</i>	<i>Friedrich Ebert-Stiftung (FES)/Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF)</i>	Manila, Filipina	2012
12.	<i>Workshop on Policy Research and Analysis for Parliamentary Researchers</i>	<i>U.S. Agency for International Development (USAID)</i>	Bogor, Indonesia	2013
13	<i>Workshop of the 11th International Parliamentary Forum (IPF)-Security Sector Governance (SSG), "Security Sector Reform and Democratization in Southeast Asia: What Role for Parliaments?"</i>	<i>Friedrich Ebert-Stiftung dan Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF)</i>		2013
14.	<i>Striving for Best Practices from ASEAN Policy and ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) Resolutions into National Law</i>	<i>ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), Deutsche Gesellschaft fuer International Zusammenarbeit (GIZ), dan Hanss Seidel Stiftung (HSS)</i>	Jakarta, Indonesia	2013

E. Konferensi dan Seminar Internasional

NO	TOPIK KONPERENSI/ SEMINAR	NAMA LEMBAGA/ SPONSOR	TEMPAT	TAHUN
1.	<i>The 13th General Assembly of ASEAN Inter-Parliamentary Organization (AIPO)</i>	<i>AIPO Secretariat/ DPRRI</i>	Jakarta	1992
2.	Dialog Kongres AS dengan Parlemen Negara-negara Asia Pasific (US-APDC)	<i>US Congress</i>	Jakarta	1993
4.	Masalah HAM di kawasan	<i>AIPO Secretariat/ DPRRI</i>	Bangkok	1993
5.	Metode Riset dalam Ilmu Sosial	<i>Dr. Robert Stevenson/ University of North Carolina</i>	Jakarta	1993
6.	<i>Le Role et Function de l'Union Inter-Parlementaire</i>	<i>IPU Secretariat</i>	Geneve, Swiss	1993
7.	Studi Komite Perlindungan Lingkungan Hidup ASEAN	<i>AIPO Sekretariat/ DPRRI</i>	Jakarta	1994
8.	<i>Comparative Legislature Seminar</i>	<i>Asia Foundation</i>	Manila, Filipina dan Wellington, Selandia Baru	1994

10.	Studi Komite Sumber Daya Maritim ASEAN Inter-Parliamentary Organization	AIPO Secretariat/ DPR-RI	Jakarta	1995
11.	WTO Second International Forum on Parliament and Local Authorities: Tourism Policy Makers	WTO Secretariat/ DPR-RI	Bali	1996
12.	Seminar mengenai Iraq, GNB, dan Tata Dunia Damai	Deplu/Jurusan Hubungan Internasional UI	Jakarta	1997
13.	The 18 th General Assembly of ASEAN Inter-Parliamentary Organization (AIPO)	AIPO Secretariat/ DPR-RI	Bali	1997
14.	The 103 rd Inter-Parliamentary Union Conference	IPU Secretariat	Amman, Jordania	2000
15.	International Human Rights Tribunal	Alan Tieger, UNHCR, UI	Jakarta	2000
16.	Handling Crisis in Indonesia	IMF Headquarter	Washington DC	2000
17.	Millennium Summit of Presiding Officers of IPU Members	UN Headquarter	New York	2000

18.	<i>The 21 General Assembly</i> <i>21 ASEAN Inter-Parliamentary Organization</i>	<i>AIPO Secretariat/ Parliament of Singapore</i>	Singapura	2000
19.	<i>The 104th Inter-Parliamentary Union Conference and Its Related Meetings</i>	<i>IPU Secretariat/ DPR-RI</i>	Jakarta	2000
20.	<i>The 105 Inter-Parliamentary Union Conference and Its Related Meetings</i>	<i>IPU Secretariat/ Majelis Nasional Kuba</i>	Havana, Kuba	2001
21.	<i>The 22nd General Assembly</i> <i>21 ASEAN Inter-Parliamentary Organization</i>	<i>AIPO Secretariat /Majelis Nasional Thailand</i>	Bangkok, Thailand	2001
22.	<i>The 23rd General Assembly</i> <i>21 ASEAN Inter-Parliamentary Organization</i>	<i>AIPO Secretariat/ Majelis Nasional Viet Nam</i>	Ho Chi Minh City, Viet Nam	2002

23.	<i>ASEAN Inter-Parliamentary Organization Study Committee Meeting on the Establishment of an ASEAN Anti-Poverty Bank and the Second AIFOCOM Meeting to Combat Drug Menace</i>	<i>AIPO Secretariat/ DPR-RI</i>	Yogyakarta	2003
24.	<i>The 24th ASEAN Inter-Parliamentary Organization</i>	<i>AIPO Secretariat/ DPR-RI</i>	Jakarta	2003
25.	<i>The 9th Meeting of the Executive Committee of Parliamentary Union of the Islamic Organisation Conference Member States</i>	<i>PUIC Secretariat/ DPR-RI</i>	Jakarta	2003
26	<i>Indonesia's Post-Soeharto Economic Challenges</i>	<i>US Chamber of Commerce and US Congress/ USINDO</i>	Washington DC	2004

27.	<i>The 25 ASEAN Inter-Parliamentary Organization di Phnom Penh, Cambodia;</i>	AIPO Secretariat/ DPR-RI	Phnom Penh, Kamboja	2004
28.	<i>The 1st Ad-Hoc ASEAN Inter-Parliamentary Organization Meetings on the ASEAN Inter-Parliamentary Organization Transformation of AIPO into a Closely and More Integrated Institution</i>	AIPO Secretariat/ DPR-RI	Bali	2006
29.	<i>The 2nd Ad-Hoc ASEAN Inter-Parliamentary Organization Meetings on the ASEAN Inter-Parliamentary Organization Transformation of AIPO into a Closely and More Integrated Institution</i>	AIPO Secretariat/ DPR-RI	Jakarta	2006

30.	<i>Technical Working Group Meeting of Transformation of ASEAN Inter Parliamentary Organization into a Closely and More Integrated Institution</i>	<i>AIPO Secretariat/ DPR-RI</i>	Jakarta	2006
31.	<i>ASEAN Inter-Parliamentary Assembly Meeting on Human Rights</i>	<i>AIPO Secretariat/ DPR-RI</i>	Phnom Penh, Kamboja	2008
32.	Perkembangan Politik dan Demokratisasi di Negara-negara ASEAN	Dr. Anwar Ibrahim/PSHK	Jakarta	2011
33.	<i>The 2nd International Seminar for Parliamentary Research Services in Asia</i>	<i>National Assembly Research Service (NARS)</i>	Seoul, Korea Selatan	2011
34.	<i>The 3rd International Seminar for Parliamentary Research Services in Asia</i>	<i>National Assembly Research Service (NARS)</i>	Seoul, Korea Selatan	2012

35.	Seminar <i>"Assessing Current Policies on Public Access to Information in ASEAN Parliaments"</i>	<i>Center for Strategic and International Studies (CSIS)</i>	Jakarta	2012
36.	Seminar <i>"Mendorong Realisasi Komunitas ASEAN 2015"</i>	<i>AIPO Secretariat/ DPR-RI</i>	Jakarta	2012
37.	The 33 rd <i>ASEAN Inter-Parliamentary Organization</i>	<i>AIPO Secretariat/ DPR-RI</i>	Lombok, NTB	2012
38.	Seminar <i>"Strengthening Security Sector Reform in Asia"</i>	<i>Friedrich Naumann Stiftung (FNS)</i>	Manila, Filipina	2012
39.	<i>Parliamentary Conference on WTO</i>	<i>IPU Secretariat/ WTO Secretariat</i>	Geneve, Swiss	2012
40.	<i>Parliamentary Forum on Inter-Faith and Inter-Religions Dialogue</i>	<i>Parliamentary Union of Islamic of the OIC Member States (PUIC)/DPR-RI</i>	Bali	2012
41.	<i>Agenda of the 2nd World Ecological Safety Assembly (WESA)</i>	<i>The Government of Peoples Republic of China</i>	Bali	2012

42.	<i>Expanding and Strengthening the US-Indonesia Security Partnership: The Maritime Cooperation</i>	<i>The United States-Indonesia Society, USINDO</i>	Jakarta	2013
43.	<i>Political Financing and Anti-Money Laundering Campaign</i>	<i>Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC), South-East Asian Parliamentarians Against Corruption (SEAPAC)</i>	Jakarta	2013

F. Riwayat Jabatan Struktural

NO	TAHUN	JABATAN	NAMA INSTANSI
1	2009-sekarang	Kepala Bidang Pengkajian	Sekretariat Jenderal DPR-RI

G. Riwayat Jabatan Fungsional

NO	JENJANG JABATAN	PANGKAT	P A K	TMT JABATAN
1.	Ajun Peneliti Madya	III/a	Ketua LIPI Nomor 322/D/1995	1 Mei 1995
2.	Peneliti Madya			1997

3.	Ahli Peneliti Muda	III/c	Ketua LIPI Nomor: 242/D/2001	1 Maret 2001
4.	Ahli Peneliti Madya	III/d	Kepala LIPI Nomor: 2558/D/2002	1 Desember 2002
5.	Peneliti Utama Golongan IV/e	IV/c	Kepala LIPI Nomor: 0215/D/2006	1 Oktober 2006

H. Riwayat Kepangkatan dan Golongan serta Unit Kerja

NO	PANGKAT	GOL	TMT	UNIT KERJA
1.	Penata Muda	III/a	1 Oktober 1990	Pusat Pengkajian Pelayanan Informasi (P3I) Setjen DPRRI
2.	Penata Muda Tk. 1	III/b	1 Oktober 1994	Pusat Pengkajian Pelayanan Informasi (P3I) Setjen DPRRI
3.	Penata Tk. 1	III/d	1 Oktober 1997	Pusat Pengkajian Pelayanan Informasi (P3I) Setjen DPRRI
4.	Pembina	IV/a	1 Maret 2011	Pusat Pengkajian Pelayanan Informasi (P3I) Setjen DPRRI
5.	Pembina Tk. 1	IV/b	1 Desember 2002	Pusat Pengkajian Pelayanan Informasi (P3I) Setjen DPR
6.	Pembina Utama Muda	IV/c	1 Oktober 2006	Pusat Pengkajian Pelayanan Informasi (P3I) Setjen DPR

7.	Pembina Utama Madya	IV/d	27 Oktober 2009	Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR
8	Pembina Utama	IV/e	6 Desember 2011	Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPRRI

I. Jumlah Publikasi Ilmiah

NO	KLASIFIKASI	JUMLAH
1.	B u k u	28
2.	J u r n a l	47
3.	Surat Kabar	198
4.	Majalah	22
5.	Media Online	2

J. Pembinaan Kader Ilmiah

NO	Nama Kegiatan/Institusi	Tahun
1.	Memberikan Bimbingan tentang Penelitian Laut Cina Selatan, P3DI, DPR-RI	2013
2.	Memberikan Bimbingan tentang Penelitian Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Indonesia, P3DI, DPR-RI	2012
3.	Memberikan Bimbingan dan Pelatihan tentang Masalah-Masalah Keparlemenan, <i>Legal Drafting</i> , dan <i>Budget Analysis</i> untuk DPRD di Lombok, Bima	2012
4.	Memberikan Bimbingan tentang Penelitian Pulau-Pulau Terluar Indonesia, P3DI, DPR-RI	2011

5.	Memberikan Bimbingan dan Pelatihan tentang Masalah-Masalah Keparlemenan, <i>Legal Drafting</i> , dan <i>Budget Analysis</i> untuk AIPD (Australia-Indonesia Project for Decentralisation)	2011
6.	Memberikan Bimbingan dan Pelatihan tentang masalah-masalah keparlemenan, <i>Legal Drafting</i> , <i>Legislative Researches</i> , dan analisis untuk <i>Indonesian Parliamentary Center (IPC)</i>	2010-sekarang
7.	Memberikan Bimbingan tentang Penelitian Perubahan Iklim, P3DI, DPR-RI	2010
8.	Memberikan Bimbingan tentang Masalah-Masalah Keparlemenan, <i>Legal Drafting</i> , dan <i>Budget Analysis</i> di DPRD Jawa Barat	2010
9.	Memberikan Bimbingan dan Pelatihan tentang masalah-masalah keparlemenan, <i>Legal Drafting</i> , <i>Legislative Researches</i> , dan analisis untuk Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi)	2009-sekarang
10.	Memberikan Bimbingan tentang Penelitian Penyelundupan Manusia	2009
11.	Memberikan Advokasi dan Asistensi tentang Tim Penelitian Universitas Freiburg Reformasi Sektor Keamanan Indonesia, <i>Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg</i> dan <i>Geneva Centre for the Democratic Control for Armed Forces</i> , DCAF, Geneve	2009
12.	Memberikan Bimbingan tentang Penelitian Masalah Perbatasan Indonesia dan PNG, P3DI, DPR-RI	2008
13.	Memberikan Bimbingan dan Pelatihan tentang Penelitian Manajemen Fraksi di DPR-RI, UNDP	2008

14.	Memberikan Bimbingan dan Pelatihan tentang Masalah-Masalah Keparlemenan, <i>Legal Drafting</i> , dan <i>Budget Analysis</i> untuk Advokasi	2008
15.	Memberikan Bimbingan dan Pelatihan tentang Masalah-Masalah Keparlemenan, <i>Legal Drafting</i> , dan <i>Budget Analysis</i> di DPRD Bogor	2008
16.	Memberikan Bimbingan dan Pelatihan tentang masalah-masalah keparlemenan, <i>Legal Drafting</i> , <i>Legislative Researches</i> , dan analisis untuk Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)	2007-sekarang
17.	Memberikan Bimbingan tentang Penelitian Masalah Perbatasan Indonesia dan Timor Leste, P3DI, DPR-RI	2007
18.	Memberikan Bimbingan dan Pelatihan tentang Masalah-Masalah Keparlemenan, <i>Legal Drafting</i> , dan <i>Budget Analysis</i> di DPRD Banten	2007
19.	Memberikan Bimbingan tentang Penelitian Pekerja Migran (TKI) Indonesia di Malaysia, P3DI, DPR-RI	2006
20.	Memberikan Bimbingan tentang Penelitian Masalah-Masalah Perbatasan, P3DI, DPR-RI	2005
21.	Memberikan Bimbingan tentang Penelitian Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas Batam, dibiayai IRI/University of Maryland	2003
22.	Memberikan Bimbingan tentang Penelitian Kemiskinan di Jakarta dan Jawa Tengah, P3DI, DPR-RI	1997
23.	Membimbing Riset untuk Disertasi Mahasiswa Doktorat Universitas Hamburg, Universitas Heidelberg dan Universitas Freiburg	

K. Organisasi Profesi

NO	NAMA ORGANISASI PROFESI	JABATAN	TAHUN
1.	Perhimpunan Akademisi/ Peneliti Asia Tenggara <i>Albert-Ludwigs- Universitaet Freiburg</i>	Anggota	2010-sekarang
2.	Asosiasi Peneliti Asia Tenggara <i>Arnold- Bergstrasse Institut</i>	Anggota	2005-2010
3.	Asosiasi Peneliti Parlemen Asia	Anggota	2011-sekarang
4.	Perhimpunan Alumni <i>Albert-Ludwigs Universitaet Freiburg</i>	Anggota	2011-sekarang
5.	Perhimpunan Alumni <i>University of Birmingham</i>	Anggota	2003-sekarang
6.	Ikatan Alumni UI (ILUNI UI)	Anggota	1986-sekarang
7.	Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Birmingham- PMIB	Anggota	1998-1999
8.	Pengurus Alumni <i>Hanns Seidel Stiftung Jerman</i> (PAHSI)	Ketua Pembangunan Sosial Budaya	2006-2011

L. Penghargaan

NO	TAHUN	PENGHARGAAN	KETERANGAN
1.	2013	Satya Lencana Karya Satya XX Tahun	Keputusan Presiden No. 50/TK/Tahun 2013 tanggal 10 Juli 2013
2.	2007	Satya Lencana Karya Satya X Tahun	Keputusan Presiden No. 036/TK/Tahun 2007 tanggal 8 Juli 2007
3.	2007	Penghargaan Karya Tulis ASEAN/AIPA	Ketua BKSAP DPR-RI Abdul Gafur

4.	2000	Peningkatan Kapasitas Parlemen lewat Komisi	Sherrie Wolf, Ph.D, NDI (National Democratic Institute)
5.	1999	<i>British Chevening Scholar</i>	Her Royal Majesty Queen Elizabeth II
6.	1997	Penyelenggaraan ASEAN Inter-Parliamentary Organization (AIPO)	Sekretaris Jenderal DPR-RI Afif Maroef
7.	1997	Pemenang Karya Tulis Pariwisata Indonesia	Menteri Pariwisata Joop Ave
8.	1996	Penyelenggaraan Konperensi HAM Internasional di DPR-RI	Ketua DPR-RI Wahono
9.	1996	Penulisan Essai Pandemi Sars dan Ancaman Keamanan	Peter Gajewski, IRIS, University of Maryland
10.	1993	<i>Als Fremde Praktikant im Thueringer Landtag</i>	Thueringer Landtag (Parlemen Negara Bagian Thueringen, Jerman)